LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2023

DP2KBP2PA
KABUPATEN KENDAL

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KENDAL

TAHUN 2024

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN COVER 0
DAFTAR ISI i
DAFTAR TABEL ii
DAFTAR GAMBAR iii
KATA PENGANTAR iv

BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi 1
1.3 Isu-isu Strategis 3
1.4 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran 4
1.5 Sistematika Penulisan 5
1.6 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP tahun 2022 6

BAB II PERENCANAAN KINERJA
2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD 9
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan 10
2.3 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2023 11
2.4 Perjanjian Kinerja tahun 2023 10
2.5 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja 12

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
3.1 Capaian Kinerja Organisasi 13
3.2 Efisiensi Anggaran 21
3.3 Innovasi 26
3.5 Penghargaan 28

BAB IV PENUTUP
4.1 Kesimpulan 30
4.2 Rekomendasi 30

LAMPIRAN
4.1 Perjanjian Kinerja .....
4.2 RKT dll .....

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel : Capaian Kinerja .....
Tabel : Realisasi Capaian Tahun 2023 .....
Tabel : Perjanjian Kinerja Keuangan .....

DAFTAR GAMBAR

Gambar : Struktur Dinas / Badan ..... Lamp.
Gambar : Cascading Kinerja ..... Lamp.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal Tahun 2023 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (good governance), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Kendal, bahwa Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa output maupun outcome.

Di sisi lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi sebagaimana tercantum dalam SK IKU DP2KBP2PA Nomor : 050/1961/XII/2021.

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan 2023, Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan Rencana Strategis Tahun 2021 – 2026 serta Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023 yang telah ditetapkan.

Kendal, 30 Januari 2024
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Kendal

PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL DP2KBP2PA

ALBERTUS HENDRI SETYAWAN, S.P., M.T.
Pembina
NIP. 19810522 200501 1 010

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), memberikan kewenangan kepada daerah provinsi/kabupaten/kota untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri. Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan dan pemberdayaan peran serta masyarakat.

Agar berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di masa mendatang dapat berhasil dengan baik, maka harus disusun dalam suatu perencanaan yang matang. Perencanaan yang disusun tentunya harus mempertimbangkan keadaan yang ada dan memprediksikan keadaan yang akan dating dengan berbagai dukungan dan hambatan yang akan timbul.

1.2 Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi

Gaya perubahan mendasar dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia dilakukan inisiasi melalui reformasi birokrasi yang dijadikan sebagai tonggak bagi pemerintahan untuk melakukan perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan. Sasaran remormasi birokrasi diantaranya terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, dimana sasaran-sasaran pencapaian tersebut dilakukan secara bertahap hingga diharapkan menghasilkan *governance* yang berkualitas.

Reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Reformasi di sini merupakan proses pembaharuan yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan, sehingga tidak termasuk upaya dan/atau tindakan bersifat radikal dan revolusioner. Bagi pemerintah daerah, penyelenggaraan reformasi birokrasi diharapkan menjadi pendukung utama dalam mempercepat terwujudnya

kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan kekhasan suatu daerah dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dengan tujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi dan memegang teguh nilai-nilai dasar kode etik aparatur negara. Adapun area perubahan yang menjadi tujuan reformasi birokrasi meliputi delapan aspek manajemen pemerintahan, yang salah satunya adalah tata laksana yang di dalamnya meliputi sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*.

Dukungan terhadp proses percapaian prinsip-prinsip *good governance* adalah dengan membangun sebuah hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit kerja dalam sebuah peta proses bisnis hubungan mandat kinerja. Peta proses bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirianorganisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Penyusunan proses bisnis diharapkan akan menghasilkan proses yang efektif dan efisien dalam menghasilkan *output dan outcome*. Memiliki aset pengetahuan yang mengintegrasikan dan mendokumentasikan secara rinci mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai tujuan jangka menengah sebagai dasar pengambilan keputusan strategis terkait pengembangan oraganisasi.

Sumber daya manusia dan penilaian kinerja untuk menjalankan proses bisnis bagi pemerintahan, berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintahan. Dalam peraturan tersebut penyusunan peta proses bisnis merupakan acuan bagi instansi pemerintahan untuk menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.

1.3 Isu-isu Strategis

Dari hasil telaahan terhadap permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi, serta telaahan terhadap beberapa dokumen perencanaan yang terkait, maka dapat diambil beberapa isu strategis terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal. Isu-isu strategis tersebut adalah sebagai berikut:

Apabila dibuat tabel, akan terlihat sbb :

Tabel 3.4

Isu – Isu Strategis Pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Isu – Isu Strategis	Bidang Urusan
1	Belum optimalnya perlindungan terhadap perempuan dan anak. Hal ini dapat dilihat masih ditemukannya kasus kekerasan perempuan dan anak, tahun 2023 sebesar 0,03 %	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	Masih belum optimalnya perwujudan Kabupaten Layak Anak, hal ini karena pada tahun 2023 baru sebesar 8% cakupan pembentukan desa layak anak	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3	Belum optimalnya peningkatan kualitas hidup keluarga, hal ini dapat dilihat dari cakupan IR yang mendapat pelatihan baru mencapai 20% pada tahun 2023 ini masih banyak perlu pembinaan dan pelatihan mengingat munculnya pelaku IR baru;	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
4	Belum optimalnya pelaksanaan PUG, tahun 2023 kelembagaan PUG yang aktif sebesar 60%	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5	Masih kurang optimalnya kesadaran masyarakat ber KB dan kurangnya partisipasi laki-laki ber KB (1,38%)	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
6	Masih cukup tingginya unmet need KB (12,27%)	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
7	Belum optimalnya cakupan bina	Pengendalian Penduduk dan

	keluarga balita (BKB), tahun 2023 sebesar 70,26 %	Keluarga Berencana
8	Belum optimalnya cakupan kampung KB, hanya 203 desa/kelurahan dari 286 desa/kelurahan	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
9	Masih rendahnya Sekolah Siaga Kependudukan (SSK), baru 8 SMA dan 1 SMP yang sudah mengintegrasikan SSK sebagai mata pelajaran	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
10	Masih lemahnya peran dan fungsi keluarga sehingga masih adanya keluarga yang melahirkan dalam kondisi stunting angka keluarga beresiko stunting adalah 81.890	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
11	Belum optimalnya cakupan kepesertaan KB aktif modern sebesar 68,9 %	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1.4 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran

a. Susunan kepegawaian (94 Orang)

1. Kepala Dinas : 1 Orang
2. Sekretaris : 1 Orang
3. Ka Bidang : 3 Orang
4. Ka Subbag Umum dan Kepegewaian : 1 Orang
5. Sub Koordinator Perencanaan dan Keuangan : 1 Orang
6. Sub Koordinator : 6 Orang
7. Pelaksana : 6 Orang
8. Petugas Lapangan : 34 Orang
9. Tenaga Penunjang Kegiatan : 9 Orang
10. Tenaga Kebersihan : 3 Orang
11. Penjaga Malam Kantor : 3 Orang
12. Pramusaji (di Balai Penyuluhan KB) : 20 Orang
13. Penjaga Malam (di Balai Penyuluhan KB) : 6 Orang

b. Sarana-Prasarana dan Anggaran

NO	Jenis Barang	Jumlah	Keterangan
1	TANAH	3	Baik
2	PERALATAN DAN MESIN	1447	
	1. Alat Angkutan	6	
	Kijang LX	1	Rusak

	Mupen	1	Kurang Baik
	Bis Pelayanan	1	Rusak
	Avansa	1	Kurang Baik
	Kijang Inova	1	Baik
	Hei Ace Mobil Angkutan Akseptor	1	Baik
	2. Honda Supra 125	47	Kurang baik
	3. Alat – alat Bengkel	9	Baik
	4. Alat – alat Pertanian	25	Baik
	5. Alat – alat Kantor dan Rumah Tangga	500	Baik
	6. Alat Studio dan Komunikasi	116	Baik
	7. Alat Kedokteran	657	Baik
	8. Alat Laboraturium	50	Baik
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	42	
	1. Gedung Balai Penyuluh	18	Baik
	2. Baliho	6	Baik
	3. Pagar	4	Baik
	4. Perkerasan Jalan	1	Cukup Baik
	5. Musola	1	Cukup Baik
	6. Garasi	1	Baik
	7. Pagar Balai Penyuluhan	4	Kurang Baik
4	JALAN IRIGASI DAN JARINGAN	2	
	1 Jaringan Internet	1	Baik
	2. Intalasi Listrik	1	Baik

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Laporan Kinerja Intansi Pemenntahan (LKjIP) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana , Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

DAFTAR ISI
Memuat Halaman Judul
BAB I PENDAHULUAN

Memuat tentang Latar belakang, Mandat Kinerja, Peta Proses dan Struktur Organisasi, Isu Strategis, Struktur Organisasi, Isu Isu Strategis Dukungan SDM, Saranan dan Anggaran dan Sistematika Penulisan

BAB II PERENCANAAN KINERJA
Memuat tentang Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD, Strategi dan Arah Kebijakan, Perjanjian Kinerja dan Instrumen Pendukung Capian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Memuat tentang Capaian Kinerja Organisasi, Realisasi Anggaran, Inovasi dan Penggh argaan

BAB IV PENUTUP
Memuat tentang Kesimpulan dan Rekomendasi

LAMPIRAN

1.6 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi Sakip Tahun 2023

NO	SARAN / REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
1	Mempublikasikan dokumen perencanaan kinerja dan pelaporan kinerja pada website resmi Pemerintah Daerah dan https://esr.menpan.go.id/ tepat waktu;	Mempublikasikan dokumen perencanaan kinerja dan pelaporan kinerja pada website resmi Pemerintah Daerah dan https: //esr.menpan.go.id/ tepat waktu; Telah mempublikasikan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja pada website resmi Pemerintah Daerah, sebagaimana terlampir
2	Menyempurnakan IKU sesuai dengan format yang seharusnya dengan mencantumkan sasaran, formulasi pengukuran, sumber data/ penanggung jawab, dan menjaga keselarasan IKU dengan dokumen perencanaan kinerja lainnya, baik di level Pemda maupun Perangkat Daerah serta menetapkan IKU menggunakan keputusan kepala Perangkat Daerah sesuai PermenPANRB Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008;	Menyempurnakan IKU sesuai dengan format yang seharusnya dengan mencantumkan sasaran, formulasi pengukuran, sumber data/ penanggung jawab, dan menjaga keselarasan IKU dengan dokumen perencanaan kinerja lainnya, baik di level Pemda maupun Perangkat Daerah serta menetapkan IKU menggunakan keputusan kepala Perangkat Daerah sesuai PermenPANRB Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008; Telah menetapkan IKU menggunakan keputusan kepala Perangkat Daerah sesuai PermenPANRB Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 yang telah dituangkan pada SK Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal Nomor : 565/1274/2021,

		tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal, sebagaimana terlampir.
3	Melakukan reviu dan penyempurnaan cascading kinerja untuk memastikan kualitas penjenjangan/ cascading kinerja dari level jabatan tertinggi hingga ke terendah dengan memperhatikan logical framework dan CSF dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi sesuai PermenPANRB Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah. Selanjutnya, memanfaatkan hasil penjenjangan/ cascading kinerja tersebut dasar sebagai untuk menyempurnakan program dan kegiatan yang efektif dan efisien dalam mengungkit kinerja;	Melakukan reviu dan penyempurnaan cascading kinerja untuk memastikan kualitas penjenjangan / cascading kinerja dari level jabatan tertinggi hingga ke terendah dengan memperhatikan logical framework dan CSF dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi sesuai PermenPANRB Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah. Selanjutnya, memanfaatkan hasil penjenjangan/ cascading kinerja tersebut sebagai dasar untuk menyempurnakan program dan kegiatan yang efektif dan efesien dalam mengungkit kinerja; Telah melakukan reviu dan penyempurnaan cascading kinerja, sebagaimana terlampir
4	Melaksanakan reviu dan penyempurnaan penyusunan pohon kinerja yang digunakan sebagai alat bantu bagi organisasi untuk mengawal struktur logika sebab-akibat atas berbagai kondisi yang diperlukan organisasi dalam menghasilkan outcome yang diinginkan. Melalui pohon kinerja, instansi pemerintah diharapkan dapat mengenali rute logika yang dapat memandu dalam menemukan strategi dan alternatif solusi baru dalam mencapai kinerja;	Melaksanakan reviu dan penyempurnaan penyusunan pohon kinerja yang digunakan sebagai alat bantu bagi organisasi untuk mengawal struktur logika sebab akibat atas berbagai kondisi yang diperlukan organisasi dalam menghasilkan outcome yang diinginkan. Melalui pohon kinerja, instansi pemerintah diharapkan dapat mengenali rute logika yang dapat memandu dalam menemukan strategi dan solusi baru dalam mencapai kinerja; Telah melaksanakan reviu dan penyempurnaan penyusunan pohon kinerja, sebagaimana terlampir.
5	Melaksanakan rapat pengendalian capaian kinerja secara periodik yang	Melaksanakan rapat pengendalian capaian kinerja secara periodic yang dipimpin langsung oleh kepala perangkat daerah dengan dengan memaparkan hasil kinerja oleh masing – masing

	dipimpin langsung oleh kepala perangkat daerah dengan memaparkan hasil kinerja oleh masing-masing penanggung jawab dan mendokumentasikan rapat serta menyusun notulen rapat sehingga sesuai dengan tahapan target yang telah ditetapkan;	penanggung jawab dan mendokumentasikan rapat sehingga sesuai dengan tahapan target yang telah di tetapkan; Telah melaksanakan rapat koordinasi pengendalian internal beserta dokumentasinya, sebagaimana terlampir
6	Laporan evaluasi terhadap capaian kinerja perangkat daerah agar dilaporkan secara tertulis kepada Bupati secara berkala;	Laporan evaluasi terhadap capaian kinerja perangkat daerah agar dilaporkan secara tertulis kepada Bupati secara berkala; DP2KBP2PA telah melaksanakan update dan input capaian kinerja secara berkala melalui SIMPOK setiap bulannya, maupun SIEVA setiap triwulan, sebagaimana terlampir, dengan alamat : - https://simpok.kendalkab.go.id - https://sieva-kendal.simda.net
7	Memastikan rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja ditindaklanjuti dengan menyusun dan melaksanakan rencana aksi yang disertai dengan data dukung hasil pelaksanaan sehingga dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik perbaikan manajemen kinerja secara berkelanjutan.	Memastikan rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja ditindaklanjuti dengan menyusun dan melaksanakan rencana aksi yang disertai dengan data dukung hasil pelaksanaan sehingga dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik perbaikan manajemen kinerja secara berkelanjutan; Telah melaksanakan rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja ditindaklanjuti dengan Menyusun dan melaksanakan rencana aksi yang disertai dengan data dukung.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD

1. Visi

Kendal Handal, Unggul, Makamur dan Berkeadilan

2. Misi

Mewujudkan sumber daya manusia yang cerdas, sehat jasmani dan rohani, berbudi pekerti luhur, dan memiliki daya saing dalam rangka menyambut revolusi industry 4.0.

3. Tujuan & Sasaran

Tujuan & Sasaran dapat dilihat pada tabel 2.1

Tabel 2.1

NO	TUJUAN	SASARAN		FORMULA INDIKATOR (Indikator Tujuan, Sasaran, Program) dan SUMBER REFERENSI INDIKATOR	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA/ SASARAN TAHUN KE-					
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya pembangunan yang berkeadilan dan responsif gender	Meningkatnya partisipasi kelembagaan PUG dan PUHA	1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	92,85	92,95	93,05	93,1	93,2	93,3	93,4
2	Peningkatan perlindungan perempuan dari Kasus kekerasan, dan perdagangan ORANG	Meningkatnya penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak.	2	Persentase Anak korban kekerasar yang ditangani instans' terkait	100	100	100	100	100	100	100
3	Peningkatan pemenuhan hak anak dalam konsep Kabupaten Layak Anak dan Perlindungan Anak khusus	Meningkatnya penanganan kasus perdagangan orang dan peningkatan pemenuhan hak anak dalam konsep kabupaten layak anak dan perlindungan anak khusus	3	Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	4,96	20	20	20	20	20	20
4	Meningkatnya kualitas kesehatar melalui pengendalianjumlah penduduk dan peningkatan peserta KB	Meningkatnya pemakaian alat kontrasepsi modern bagi PUS	4	TFR (Total Fertility Rate)	2,2	2,3	2,3	2,3	2,2	2,2	2,2
			5	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/ mCPR)	65	69	69	70	70	71	71
			6	Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	15,77	15	14	13	12	11	10

2.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Menjabarkan dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam renstra.

NO	TUJUAN	SASARAN		FORMULA INDIKATOR (Indikator Tujuan, Sasaran, Program) dan SUMBER REFERENSI INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA/ SASARAN TAHUN KE-						
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya pembangunan yang berkeadilan dan responsif gender	Meningkatnya partisipasi kelembagaan PUG dan PUHA	1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	92,85	92,95	93,05	93,1	93,2	93,3	93,4
2	peningkatan perlindungan perempuan dan Kasus kekerasan, dan perdagangan ORANG	Meningkatnya penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak.	2	Persentase Anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait	%	100	100	100	100	100	100	100
3	peningkatan pemenuhan hak anak dalam konsep Kabupaten Layak Anak dan Perlindungan Anak khusus	Meningkatnya penanganan kasus perdagangan orang dan peningkatan pemenuhan hak anak dalam konsep kabupaten layak anak dan perlindungan anak khusus	3	Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100 000 penduduk perempuan)	/100.000 penduduk perempuan	4,96	20	20	20	20	20	20
4	Meningkatnya kualitas kesehatanmelalu pengendalianjumlah penduduk dan peningkatan peserta KB	Meningkatnya pemakaian alat kontrasepsi modern bagi PUS	4	TFR (Total Fertility Rate)	Indeks	2,2	2,3	2,3	2,3	2,7	2,2	2,2
			5	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/ mCPR)	%	65	69	69	70	70	71	71
			6	Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	15,77	15	14	13	12	11	10

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	Meningkatnya partisipasi kelembagaan PUG dan PUHA	Peningkatan kesertaan dan keaclian gender melalui peningkatan PUG di semua perangkat daera, peningkatan perlindungan perempuan dari kasus kekerasan dan perdagangan peningkatan pemenuhan hak anak dalam konsep KLA dan perlindungan Anak khusus	Memberikan memenuhi dan mejalin pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan sertamampu meningkatkan dan kesejahteraan
2	Meningkatnya penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak.		
3	Meningkatnya penanganan kasus perdagangan orang dan peningkatan pemenuhan hak anak dalam konsep kabupaten layak anak dan perlindungan anak khusus		
4	Meningkatnya pemakaian alat kontrasepsi modern bagi PUS	Peningkatan kualitas kesehatan melalui pengendalian jumlah penduduk dan peningkatan peserta KB	

2.3 Perjanjian Kinerja

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja (Indikator Formula)	Satuan	Target					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1. Meningkatnya pembangunan yang berkeadilan dan responsif gender peningkatan perlindungan perempuan dari Kasus kekerasan, dan perdagangan, peningkatan pemenuhan hak anak dalam konsep Kabupaten Layak Anak dan Perlindungan Anak khusus 2. Meningkatnya kualitas kesehatanmelalui pengendalianjumlah penduduk dan peningkatan peserta KB	1. Meningkatnya partisipasi kelembagaan PUG dan PUHA 2. Meningkatnya penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak khusus 3. Meningkatnya pemakaian alat kontrasepsi modern bagi PUS	1. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	92,25	93,05	93,1	93,2	93,3	93,4
		2. Persentase Anak korban kekerasan yang dilanyani instansi terkait	%	100	100	100	100	100	100
		3. Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	/100.000 penduduk perempuan Indeks	20	20	20	20	20	20
		4. TFR (Total Fertility Rate)	%	2,3	2,3	2,3	2,2	2,2	2,2
		5. Persentase pemakaian kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/ mCPR)	%	69	69	70	70	71	71
		6. Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (unmeetneed)	%	15	14	13	12	11	10

NO	Program	Aanggaran	Indikator Kinerja	Target					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	215.460.000	1. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	92,25	93,05	93,1	93,2	93,3	93,4
2	PERLINDUNGAN PEREMPUAN	93.705.000	2. Prosentase Anak korban kekerasan yang ditangani Instansi terkait	100	100	100	100	100	100
3	PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	89.017.500	3. Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	20	20	20	20	20	20
4	PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	-	4. TFR (Total Fertility Rate)	2,3	2,3	2,3	2,2	2,2	2,2
5	PEMENUHAN HAK ANAK	71 575.000	5. Presentase pemakaian kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate3/ mCPR)	69	69	70	70	71	71
6	PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	70.000.000							
7	PENGENDALIAN PENDUDUK	41.617.000							
8	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	5.116.300.000							
9	PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	5.103.370.000							
10	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB / KOTA	5.359.227.920	6. Presentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (unmetnee)	15	14	13	12	11	10

2.4 Intrumen pendukung Capaian Kinerja

Instrumen Pendukung Capaian Kinerja adalah Government Resources Management System Kabupaten Kendal, (GRMS) adalah bangunan system aplikasi terintegrasi pemerintah Kabupaten Kendal. Sistem aplikasi yang terdiri atas SIPD RI, SIPD Kemendagri, Simpok, e-sakip, e-monev, Renja PD dan Renstra PD pun mulai diterapkan di Kabupaten Kendal. Muara dalam sistem ini adalah integrasi antar data didalam proses bisnis internal birokrasi yang notabene merupakan system pengelolaan keuangan pemerintah dalam menyokong pelayanan publik dan pembangunan sehingga tercipta monitoring dan evaluasi kinerja birokrasi secara real-time.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja dapat diartikan sebagai kewajiban untuk mempertanggung jawabkan secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam dalam pencapaian visi dan melaksanakan misi kepada pihak – pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas.

Pengukuran kinerja yang digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, yang telah ditetapkan dalam visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kendal terpilih. Pengukuran dimaksud itu merupakan suatu hasil dari suatu penilaian kerja kegiatan berupa masukan, keluaran dan hasil.

Penilaian dimaksud tidak terlepas dan kegiatan mengolah masukan untuk diproses menjadi keluaran penting dan berpengaruh terharap pencapaian tujuan sasaran.

Pada pembahasan akuntabilitas kinerja Tahun 2023 ada 3 (tiga) aspek yang akan di bahas, yaitu :

1. Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS)
2. Akuntabilitas Keuangan
3. Evaluasi dan Analisis Kinerja

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Skala nilai peringkat Kinerja sebagai berikut

a. Sangat baik : > 100%
b. Baik : 85 - 100%
c. Cukup : 65 - 84,99%
d. Kurang : 50 - 64,99%
c. Sangat Kurang : < 50, %

Tabel Capaian Kinerja Tahun 2023

Tujuan	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023			Target akhir RPJMD
			target	Realisasi	presentase	
1. Meningkatnya pembangunan yang berkeadilan dan responsif gender peningkatan perlindungan perempuan dari Kasus kekerasan, dan perdagangan, peningkatan pemenuhan hak anak dalam konsep Kabupaten Layak Anak dan Perlindungan Anak khusus	1. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	93,1	93,79	101	93,4
	2. Persentase Anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait	%	100	100	100	100
	3. Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	/100.000 penduduk perempuan	20	8,03	249	20
	4. TFR (Total Fertility Rate)	Indeks	2,3	1,9997	115	2,3
2. Meningkatnya kualitas kesehatanmelalui pengendalian jumlah penduduk dan peningkatan peserta KB	5. Persentase pemakaian kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/ mCPR)	%	70	68,9	98	71
	6. Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	13	12,27	106	10

menyajikan kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1. Meningkatnya pembangunan yang berkeadilan dan responsif gender peningkatan perlindungan perempuan dari Kasus kekerasan, dan perdagangan, peningkatan pemenuhan hak anak dalam konsep Kabupaten Layak Anak dan Perlindungan Anak Khusus	1. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	93,1	93,79	101	Sangat Baik	RPJMD dan sieva
	2 Persentase Anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait	100	100	100	Baik	RPJMD dan sieva
	3. Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	20	8,03	249	Sangat Baik	RPJMD dan sieva
	4. TFR (Total Fertility Rate)	2,3	1,9997	115	Sangat Baik	RPJMD dan sieva
2. Meningkatnya kualitas kesehatanmelalui pengendalian jumlah penduduk dan peningkatan peserta Kb	5. Persentase pemakaian kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/ mCPR)	70	68,9	98	Baik	RPJMD dan sieva
	6. Persentase kebutuhan per Kb yang tidak terpenuhi (unmeet need)	13	12,27	106	Sangat Baik	RPJMD dan sieva

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir (minimal 3 tahun);

Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	2021			2022			2023		
		target	Realisasi	Capaian %	target	Realisasi	Capaian %	target	Realisasi	Capaian %
1. Meningkatnya pembangunan yang berkeadilan dan responsif gender peningkatan perlindungan perempuan dan	1. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	92,95	93,03	100	93,05	93,79	101	93,1	93,79	101
	2. Persentase Anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kasus kekerasan, dan perdagangan, peningkatan pemenuhan hak anak dalam konsep Kabupaten Layak Anak dan Perlindungan Anak khusus	3. Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	20	7,27	275	20	10,42	192	20	8,03	249
	4. TFR (Total Fertility Rate)	2,3	2,2	105	2,3	2,14	107	2,3	1,9997	115
2. Meningkatnya kualitas kesehatanmelalui pengendalianjumlah penduduk dan peningkatan peserta KB	5. Persentase pemakaian kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/ mCPR)	69	56,66	82	69	66,19	96	70	68,9	98
	6. Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (unmetned)	15	20	75	14	17,44	80	13	12,27	106

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2023	Target Akhir 2026	Tingkat Kemajuan
1. Meningkatnya pembangunan yang berkeadilan dan responsif gender peningkatan perlindungan perempuan dan Kasus kekerasan, dan perdagangan, peningkatan pemenuhan hak anak dalam konsep Kabupaten Layak Anak dan Perlindungan Anak khusus 2. Meningkatnya kualitas kesehatanmelalui pengendalianjumlah penduduk dan peningkatan peserta KB	1. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	101	93,4	Sangat Baik
	2. Persentase Anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait	100	100	Baik
	3. Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100 000	249	20	Sangat Baik
	4. TFR (Total Fertility Rate)	115	2,2	Sangat Baik
	5. Presentase pemakaian kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate3/ mCPR)	98	71	Baik
	6. Presentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (unmetned)	106	10	Sangat Baik

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)

Tujuan/ Sasaran	No	IndikatorKinerja	Realisasi 2023	Standar Nasional	% Capaian
1. Meningkatnya pembangunan yang berkeadilan dan responsif gender peningkatan perlindungan perempuan dan Kasus kekerasan, dan perdagangan, peningkatan pemenuhan hak anak dalam konsep Kabupaten Layak Anak dan Perlindungan Anak khusus 2. Meningkatnya kualitas kesehatanmelalui pengendalianjumlah penduduk dan peningkatan peserta KB	1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	93,79	91,63	102
	2	Persentase Anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait	100	Tidak ada	Tidak ada
	3	Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	8,03	Tidak ada	Tidak ada
	4	TFR (Total Fertility Rate)	1,9997	2.14	107
	5	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/ mCPR)	68,9	Tidak ada	Tidak ada
	6	Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (unmetned)	12,27	Tidak ada	Tidak ada

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;

Tujuan/ Sasaran	No	IndikatorKinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023	Analis Keberhasilan/ kegagalan	Solusi yang dilakukan
1. Meningkatnya pembangunan yang berkeadilan dan responsif gender peningkatan perlindungan perempuan dari Kasus kekerasan, dan perdagangan, peningkatan pemenuhan hak anak dalam konsep Kabupaten Layak Anak dan Perlindungan Anak khusus	1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	93,1	93,79	101	Sangat Baik	Upaya untuk meningakatkan perlu koordinasi dan sosialisasi dengan OPD terkait
	2	Persentase Anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait	100	100	100	Baik	Pembinaan monitoring dan evaluasi kegiatan secara berkala kegiatan yang telah berjalan
	3	Raso kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	20	8,03	249	Sangat Baik	Pembinaan monitoring dan evaluasi kegiatan secara berkala kegiatan yang telah berjalan
2. Meningkatnya kualitas kesehatanmelalui pengendalian jumlah penduduk dan peningkatan peserta KB	4	TFR (Total Fertility Rate)	2,3	1,9997	115	Sangat Baik	Pembinaan monitoring dan evaluasi kegiatan secara berkala kegiatan yang telah berjalan
	5	Persentase perrakaian kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/ mCPR)	70	68,9	98	Baik	Memberikan Advokasi dan KIE kepada PUS untuk beralih menggunaka alat kontrasepsi modern
	6	Persentase kebutuhan ber KB yang tdak terpenuhi (unmetned)	13	12,27	106	Sangat Baik	Memberikan Avokasi dan KIE pada masyarakat melalui berbagai Media untuk ber-KB

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023	Analisis Keberhasilan/ kegagalan	Anggaran			Tingkat Efisiensi (%)
							Pagu	Realisasi	%	
1. Meningkatnya pembangunan yang berkeadilan dan responsif gender peningkatan perlindungan perempuan dan Kasus kekerasan, dan perdagangan, peningkatan pemenuhan hak anak dalam konsep Kabupaten Layak Anak dan Perlindungan Anak khusus	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	93,1	93,79	101	Sangat Baik	1.112.365.500	988.632.901	89	11
	Persentase Anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait	%	100	100	100	Baik				
	Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	/100.000 penduduk perempuan	20	8,03	249	Sangat Baik				
2. Meningkatnya kualitas kesehatanmelalui pengendalian jumlah penduduk dan peningkatan peserta KB	TFR (Total Fertility Rate)	%	2,3	1,9997	115	Sangat Baik	18.461.858.790	17.516.006.212	95	5
	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/ mCPR)	%	70	68,9	98	Baik				
	Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (unmetned)	%	13	12,27	106	Sangat Baik				

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalanpencapaian pernyataan kinerja

Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian 2023	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian 2023	Menunjang/Tidak Menunjang
1. Meningkatnya pembangunan yang berkeadilan dan responsif gender peningkatan perlindungan perempuan dari kasus kekerasan, dan perdagangan, peningkatan pemenuhan hak anak dalam konsep Kabupaten Layak Anak dan Perlindungan Anak khusus	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	101	PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase OPD yang mengimplementasikan PUG	100	Menunjang
			PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga yang dibina	100	Menunjang
			PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase OPD yang memiliki data pilah Gender	100	Menunjang
			PEMENUHAN HAK ANAK	Persentase kecamatan layak anak	70	Menunjang
	Prosentase Anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait	100	PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase kekerasan pada anak yang ditangani	100	Menunjang
	Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	237	PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase kekerasan terhadap perempuan yang ditangani	100	Menunjang
2. Meningkatnya kualitas kesehatanmelalui pengendalian jumlah penduduk dan peningkatan peserta KB	TFR (Total Fertility Rate)	115	PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase penurunan usia pernikahan dini	20	Menunjang
	Presentase pemakaian kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/ mCPR)	99	PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi	12,27	Menunjang
	Presentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	106	PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase kelompok masyarakat dibidang pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera yang dibina	70	Menunjang

3.2 Efisiensi Anggaran

Form A

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN APBD Kabupaten Kendal
TAHUN ANGGARAN 2023
OPD : 2.14.2.08.0.00.01.0000 - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Kondisi sampai dengan : 31 Desember 2023

No.	Kode	Urai OPD / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Rekening Belanja	Pagu	Perubahan Realisasi Keuangan Rp.	%	Fisik %
1	2	3	8	9	10	11
1	2.14.2.08.0.00.01.0000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	19.574.224.290	18.504.639.113	95	95
2	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	627.732.000	515.910.020	82	60,31
3	2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	105.125.000	101.721.410	97	93,2
4	2.08.02.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	56.125.000	54 298.500	97	90,66
5	2.08.02.2.01.04	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	49.000.000	47.422.910	97	96,1
6	2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	89.600.000	83 195.000	93	94,55
7	2.08.02.2.02.01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	89.600.000	83.195.000	93	94,55
8	2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	433.007.000	330.993.610	76	45,24
9	2.08.02.2.03.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	86.565.000	54.789.198	63	60,02
10	2.08.02.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	106.942.000	92.667.693	87	82,54
11	2.08 02.2.03.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	239.500.000	183.536.719	77	23,23
12	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	178.043.000	177.854.068	100	94,36
13	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	158.043.000	157.854.068	100	95,82
14	2.08.03.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	158.043.000	157.854.068	100	95,82
15	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	20.000.000	20.000.000	100	82,81
16	2.08.03.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	20.000.000	20.000.000	100	82,81

17	2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	126.743.250	123.624.793	98	90,72
18	2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	126.743.250	123.624.793	98	90,72
19	2.08.04.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	48.000.000	47.430.000	99	94,2
20	2.08.04.2.01.02	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	78.743.250	76.194.793	97	88,6
21	2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	77.676.250	73.035.000	94	94,98
22	2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	77.676.250	73.035.000	94	94,98
23	2.08.05.2.01.01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	77.676.250	73.035.000	94	94,98
24	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	71.751.000	68.262.000	95	77,25
25	2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	45.503.000	44.872.000	99	94
26	2.08.06.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	25.000.000	24.748.000	99	98,99
27	2.08.06.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	20.503.000	20.124.000	98	87,91
28	2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	26.248.000	23.390.000	89	48,22
29	2.08.06.2.02.01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	11.863.000	11.275.000	95	54,39
30	2.08.06.2.02.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	14.385.000	12.115.000	84	43,14
31	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	30.420.000	29.947.000	98	87,92
32	2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	4.376.000	4.376.000	100	62,2
33	2.08.07.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	4.376.000	4.376.000	100	62,2
34	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	26.044.000	25.571.000	98	92,24
35	2.08.07.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	6.244.000	5.946.000	95	81,72
36	2.08.07.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	19.800.000	19.625.000	99	95,55
37	2.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.620.631.690	4.037.511.697	87	85,63
38	2.14.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	47.298.300	44.817.100	95	91,48
39	2.14.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	47.298.300	44.817.100	95	91,48
40	2.14.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.642.055.303	3.105.432.060	85	87,57
41	2.14.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.342.997.303	2.820.272.460	84	89
42	2.14.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	299.058.000	285.159.600	95	71,61

43	2.14.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	76.404.000	76.402.644	100	89,82
44	2.14.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	76.404.000	76.402.644	100	89,82
45	2.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	351.574.087	312.109.619	89	81,74
46	2.14.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	37.000.000	36.958.000	100	99,72
47	2.14.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	68.064.000	60.147.100	88	72
48	2.14.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	17.710.000	17.634.970	100	75,03
49	2.14.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.000.000	2.000.000	100	90
50	2.14.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	211.800.087	180.053.449	85	81,57
51	2.14.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	15.000.000	14.716.100	98	90,77
52	2.14.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	54.500.000	53.720.000	99	98,57
53	2.14.01.2.07.05	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	54.500.000	53.720.000	99	98,57
54	2.14.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	297.800.000	287.638.745	97	89,67
55	2.14.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	3.000.000	100	100
56	2.14.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	125.000.000	116.336.777	93	87,08
57	2.14.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	27.800.000	27.778.600	100	94,66
58	2.14.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	142.000.000	140.523.368	99	90,77
59	2.14.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	161.000.000	157.391.729	98	34,51
60	2.14.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	75.000.000	71.083.729	96	74,08
61	2.14.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	1.000.000	1.000.000	100	-
62	2.14.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	85.000.000	84.408.000	99	-
63	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	250.000.100	249.091.200	100	98,32
64	2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	250.000.100	249.091.200	100	98,32
65	2.14.02.2.01.10	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	225.000.100	224.729.200	100	99,9
66	2.14.02.2.01.11	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	25.000.000	24.362.000	97	84,07
67	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	7.713.510.000	7.504.467.272	97	86,75
68	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	1.318.900.000	1.237.495.658	94	84,13
69	2.14.03.2.01.02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	220.000.000	215.056.000	98	95,41
70	2.14.03.2.01.03	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	172.200.000	164.898.000	96	79,76

71	2.14.03.2.01.04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	60.000.000	56.955.556	95	87,88
72	2.14.03.2.01.07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	866.700.000	800.786.102	92	81,87
73	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	1.284.565.000	1.278.641.300	99	92
74	2.14.03.2.02.01	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	60.000.000	58.399.300	97	95,41
75	2.14.03.2.02.03	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	62.965.000	62.412.000	99	99,26
76	2.14.03.2.02.04	Pengerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1.161.600.000	1.155.830.000	100	91,43
77	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	4 353.145.000	4.234.084.760	97	85,23
78	2.14.03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	2.337.260.000	2 239.522.260	96	91,02
79	2.14.03.2.03.06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	2.015.885.000	1.994.562.500	99	78,51
80	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	756.900.000	756.245.554	100	91,15
81	2.14.03.2.04.01	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	76.900.000	76.305.554	99	99,22
82	2.14.03.2.04.03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	660.000.000	659.940.000	100	89,99
83	2.14.03.2.04.04	Pembinaan Terpadu Kampung KB	20.000.000	20.000.000	100	98,44
84	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	5.867.717.000	5.724.935.843	98	90,01
85	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	5 867.717.000	5.724.935.843	98	90,01
86	2.14.04.2.01.02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	9.084.000	8 876.300	98	97,72
87	2.14.04.2.01.03	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	34.426.000	30.432.000	88	84,92
88	2.14.04.2.01.04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	32.807.000	31.578.543	96	93,82
89	2.14.04.2.01.05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	5.765.500.000	5.628.374.000	98	90,01
90	2.14.04.2.01.07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	25.900.000	25.675.000	99	89,29
		TOTAL	19.574.224.290	18.504.639.113	95	95

Akuntabilitas Keuangan Pelaksanaan APBD Tahun 2022

Pada tahun 2022 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendapatkan Anggaran sebesar :

Rp. 19.574.224.290 dari dana APBD dan DAK realisasinya anggaran sampai dengan Semester II 2023 terserap sebanyak : Rp. 17.284.966.728 (81,79%)

No	Sumber Anggaran	Pagu	Realisasi	%
1	DAU Block Grand	5.319.207.190	4.699.535.031	88,35
2	DAU SD Pendidikan	756.007.100	652.262.810	86,28
3	DAU SG Kesehatan	519.865.000	509.128.410	97,93
4	BOKB	10.963.260.000	10.649.150.362	97,13
5	DAK FISIK	2.015.885.000	1.994.562.500	98,94
	JUMLAH	19.574.224.290	18.504.639.113	94,54

3.3 Inovasi

Inovasi DP2KBP2PA Tahun 2023 sebai berikut :

A. Pengembangan Industri Rumahan (BANG DELIMAH)

1.	Nama Tujuan	:	INDUSTRI RUMAHAN
2.	Nama Lembaga	:	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
3.	Nama Program	:	PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
4.	Lokasi & Waktu	:	DESA TAMBAKSARI, DESA TANJUNGSARI KEC. ROWOSARI TAHUN 2016 – 2018 (Pemindangan dan Pengasapan)
5.	Latar Belakang	:	Kabupaten Kendal menduduki peringkat kedua sebagai Kabupaten pengirim Tenaga Kerja Wanita terbesar di Jawa Tengah. Oleh karena itu pengembangan industri rumahan sebagai solusi untuk mengurangi niat perempuan menjadi
6.	Proses Pelaksanaan	:	
	a. Strategi	:	Pengembangan mudel industry rumahan di Kabupaten Kendal sangat baik karena Kabupaten Kendal menjadi tempat pertama dilaksanakannya model pengembangan industry rumahan sekaligus menjadi salah satu wilayah percontohan model industry rumahan yang berhasil mengalami kemajuan dan hanya kabupaten Kendal yang berhasil mendorong naiknya status usaha IR dan IR3 (Industri Rumahan Maju) menuju (Industri Kecil Menengah) IKM
	b. Pihak Terlibat	:	1. MoU antara Kementrian PP dan PA dengan Pemerintah Kabupaten Kendal (Bupati Kendal) Tahun 2012 2. RPJM Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 – 2021 3. Rencana Pemerintah Kabupaten Kendal untuk peningkatan ekonomi berbasis klister , klister batik, bandeng, jambu biji getas merah, dan makanan ringan yang menjadi produk unggulan kabupaten Kendal 4. MoU dengan LIPI tahun 2013
	c. Penerima Manfaat	:	Pengembangan industri rumahan sangat diperlukan untuk meningkatkan daya saing dan peningkatan pendapatan keluarga, serta menjaga kelangsungan produksi pada musim paceklik dan agar tetap dapat mencukupi kebutuhan keluarga sehingga dapat meningkatkan klasifikasi dari IR 1, IR 2 ke IR 3 dan IR 3 menuju ke IKM
	Lain-lain	:	
7.	Hasil & Dampak	:	Pengembangan industry rumahan sangat membantu untuk mengatasi permasalahan para pelaku industry rumahan diantaranya adalah sebagai berikut : 1. Meningkatnya Sumber Daya Manusia para pelaku industry rumahan 2. Meningkatkan ketrampilan pelaku industry rumahan 3. Meningkatkan citra produk desa unggulan 4. Meningkatnya omset penjualan hasil produksi 5. Meningkatnya pendapatan keluarga
8.	Tantangan & Pembelajaran	:	
	a. Tantangan	:	Program pengembangan industry rumahan memiliki potensi untuk diterapkan pada wilayah lain, itu terbukti dari pernyataan Deputi bidang kesetaraan gender dari Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik

Indonesia (KPPA RI) yang menyatakan bahwa kabupaten Kendal menjadi tempat pertama dilaksanakannya model pengembangan industry rumahan sekaligus menjadi salah satu wilayah percontohan model industry rumahan yang berhasil mengalami kemajuan dan hanya kabupaten Kendal yang berhasil mendorong naiknya status usaha IR dan IRT (Industri Rumahan Maju) menuju (Industri Kecil Menengah) IKM

b. Pembelajaran : Kebutuhan pelaku industry rumahan antara lain :
1. Permodalan dari dana desa, bantuan pinjaman lunak (KUR) dan sponsor pihak swasta
2. Pelatihan yang dilakukan oleh OPD tingkat Kabupaten Kendal
3. Sumber daya alam bekerja sama dengan pihak luar di Kabupaten Kendal pada saat musim paceklik (kesulitan bahan baku)
4. Bantuan peralatan untuk pelaku industry rumahan dari Kementrian PPPA dan pihak pihak terkait

9. Peluang Replikasi : Program Pengembangan industry rumahan bukan hasil replikasi ini berawal dari program KPPA RI Tahun Anggaran 2016 oleh untuk menjamng kegiatan – kegiatan inovasi pelaku industry rumahan. Program pengembangan industry rumahan sudah masuk dalam program percontohan bagi kabupaten lain karena berhasil mengalami kemajuan, untuk selanjutnya dilaksanakan di :
DESA WONOREJO, DESA KRAJANKULON KECAMATAN KALIWUNGU TAHUN 2019 (Pemasaran dan Kewirausahaan)
DESA BANGUNSARI DAN DESA KARTIKASARI KECAMATAN PATEBON TAHUN 2019 (Pemasaran dan Kewirausahaan)
DESA KERTOMULYO DAN TUNGGULSARI KECAMATAN BRANGSONG TAHUN 2021 (Pemasaran dan Kewirausahaan)

B. Joko Ting Ting (Jogo Tonggo Cegah Stunting)

1. Nama Tujuan : Joko Ting Ting (Jogo Tonggo Cegah Stunting)
2. Nama Lembaga : DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
3. Nama Program : PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)
4. Lokasi & Waktu : KABUPATEN KENDAL
5. Latar Belakang : Program ini diangkat dengan ditemukannya kasus di Desa Purwokerto, Kecamatan Brangsong yang memerlukan bantuan pendampingan dari tetangga sekitar
6. Proses Pelaksanaan :

d. Strategi :
1. Pihak Desa untuk dapat menunjuk minimal 1 (satu) tetangga terdekat untuk menjadi Tetangga Asuh Anak Stunting yang bisa membantu pengasuhan baduta stunting dengan intensif
2. Seluruh Tetangga Asuh untuk berkomunikasi kepada TPK dan Bidan Desa mengenai perkembangandan kendala baduta stunting
3. Seluruh Baduta dan Balita stunting harus dirujuk ke puskesmas untuk memperoleh penanganan awal
4. Jika ada indikasi tertentu rujukan gratis tanpa antrike RSUD dr Soewondo. Dapat menghubungi Puskesmas atau PKB Kecamatan untuk diteruskan kepada DP2KBP2PAKabupaten Kendal selaku sekretariat

percepatan penurunan stuntingKabupaten Kendal

e. Pihak Terlibat : Perangkat Desa, TPPS Desa, Puskesmas, TPPS Kecamatan, masyarakat dan tetangga sekitar

f. Penerima Manfaat : Jogo Tonggo Untuk Cegah Stunting bermanfaat dan sangat di perlukan untuk mengentaskan Baduta (Bawah Dua Tahun) dari stunting

Lain-lain :

7. Hasil & Dampak : Mengentaskan Baduta dari Stunting

8. Tantangan & Pembelajaran :

c. Tantangan : 1.Kepedulian tertangga yang kurang
2 Tetangga yang sudah tua, sehingga untuk menyampaikan KIE dan Advokasi tentang stunting masih sulit diterima

d. Pembelajaran : Kebutuhan anak stunting antara lain :
Optimalisai dana Desa untuk PMT Baduta dan Balita Stunting.

9. Peluang Replikasi : Program Joko Ting Ting bukan hasil replikasi ini berawal dari dan di inisiasi oleh Tim Audit Kasus Stunting Kabupaten Kendal

3.4 Penghargaan

PENGHARGAAN PENGHARGAAN DP2KBP2PA DI TAHUN 2023

NO	JUDUL PRESTASI	OPD	KETERANGAN	PENGHARGAAN DARI
1	Pencapaian Hasil Pelayanan KB Di Atas 100% Dalam Rangka Hari Kontrasepsi Se Dunia Tahun 2023, Juara 2 Tingkat Provinsi	DP2KBP2PA	Juara 2 Tingkat Provinsi	Perwakilan BKKBN Prov Jateng
2	Lomba Sekolah Siaga Kependudukan Paripurna Terbaik Tahun 2023 Tingkat SMA / MA / Sederajat, Juara 3 Tingkat Nasional	DP2KBP2PA	Juara 3 Tingkat Nasional	BKKBN RI
3	Anugerah Parahita Ekapraya, Kategori Nindya	DP2KBP2PA	Kategori Nindya	Kementenan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia
4	Kabupaten Layak Anak, Kategori Pratama	DP2KBP2PA	Kategori Pratama	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia
5	Kelompok BKR Unggulan Tk Provinsi, Kategori Ter - Inovatif	BKR Abadi Desa Bojonggede Kec. Ngampel	Kategori Ter - Inovatif	BKKBN Provinsi Jawa Tengah
6	Kelompok PIK Remaja Beraksi (usia 15-19 tahun Beraksi), PIK R Avara Asa SMAN 1 Boja	PIK R Avara Asa SMAN 1 Boja	Juara II	BKKBN Provinsi Jawa Tengah
7	Forum Genre Tk Provinsi, Juara III tk Provinsi	Forgen Kab. Kendal	Juara III	BKKBN Provinsi Jawa Tengah
8	Pelaksanaan Program Kerja Terbaik Tk. Provinsi, Juara II	Forgen Kab. Kendal	Juara II	BKKBN Provinsi Jawa Tengah

9	Gen-Reaksi (Genre Berani, Beraksi dan Berkolaborasi), Juara II	Forgen Kab. Kendal	Juara II	BKKBN Provinsi Jawa Tengah	
10	Praktik Baik Audit Kasus Stunting Indonesia (Petik Aksi) Tingkat Nasional, Juara I	Kab. Kendal	Juara I	BKKBN RI	
11	Lomba Poster Competition Audit Kasus Stunting Indonesia, Juara I	Kab. Kendal	Juara I	BKKBN RI	

BAB IV
PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Anak kabupaten Kendal sebagai OPD teknis yang mempunyai tugas menyusun kebijakan, mengkordinasokan melakukan urusan pemerintah di bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana di daerah. Agar melakukan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana secara efektif dan seefisien mungkin.

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut diatas, maka dapat dikatakan bahwa Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan cukup berhasil karena beberapa target sarana yang telah ditetepkan dicapai dan beberapa yang masih di bawah target, harapan kami di akhir tahun nanti target yang belum tercapai dapat di atasi.
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Anak kabupaten Kendal menggunakan dan (kurang) dari dana yang dianggarkan.

4.2 REKOMENDASI

Strategi yang dilaksanakan dalam menghadapi permasalahan tersebut adalah:

1. Sosialisasi program kepada semua petugas lapangan dan stakeholders.
2. Penetapan SK Desa Layak Anak, Puskesmas Layak Anak, SK Sekolah Layak Anak.
3. Ketrampilan yang memadai bagi seluruh stakeholders.
4. Mengusulkan Operasional petugas Lapangan dan UPTB dan kader (PPKBD, Kader Tribina dan UPPKS).
5. Pembinaan rutin dan koordinasi Petugas Lapangan dan pegawai dilingkungan DP2KBP2PA.
6. Mengoptimalkan kerja sama mitra terkait.
7. Mengajukan proposal usaha ke tingkat Provensi dan Pusat.
8. Koordinasi dan sosialisasi dengan OPD terkait, Tingkat Kabupaten / Provinsi dan Pusat.
9. Permohonan alat kontrasepsi ke pusat sesuai kebutuhan masyarakat.
10. Pemberian layanan kesehatan reproduksi dan penggantian retribusi layanan pemasangan alat kontrasepsi yang dilakukan melalui Puskesmas / KKB.
11. Memberikan Penghargaan pada Akseptor MOP

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/ evaluasi untuk kegiatan/kinerja yang akan datang.

Sekian dan trimakasih.

Kendal, 31 Januari 2024
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Kendal

ALBERTUS HENDRI SETYAWAN, S.P., M.T.
Pembina
NIP. 19810522 200501 1 010

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini:

Nama	:	ALBERTUS HENDRI SETYAWAN, SP, MT
Jabatan	:	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama	:	DICO M. GANINDUTO
Jabatan	:	BUPATI KENDAL

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kendal, 30 Januari 2023

PIHAK KEDUA,	PIHAK PERTAMA,
DICO M. GANINDUTO	ALBERTUS HENDRI SETYAWAN, SP, MT
	NIP. 19810522 200501 1 010

PERJANJIAN KINERJA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Partisipasi Kelembagaan PUG dan PUHA	1. IPG (Indeks Pembangunan Gender)	93,1
2.	Meningkatnya Penanganan Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak	2. Presentase Anak Korban kekersan yang ditangani instansi terkait kabupaten	100 %
3.	Meningkatnya Penanganan Kasus Perdagangan Orang dan Peningkatan Pemenuhan Hak anak dalam konsep KLA dan Perlindungan Anak Khusus	3. Rasio Kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 Penduduk Perempuan	20/100.0000 penduduk perempuan
4.	Meningkatnya Pemakaian Alat Kontrasepsi modern bagi PUS	4. Presentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/CPR)	70 %
5.	Peningkatan Layanan Kesertaan ber KB bagi PUS	5. Angka Kelahiran Total (TFR)	2,3
		6. Presentase Kebutuhan ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmeet Need)	13 %

No	Program dan Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	4.442.580.541	DAU
2.	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	645.065.000	DAU
3.	Program Perlindungan Perempuan	216.000.000	DAU
4.	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	122.000.000	DAU
5.	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	78.416.250	DAU
6.	Program Perlindungan Hak Anak	90.000.000	DAU
7.	Program Perlindungan Khusus Anak	119.000.000	DAU
8.	Program Pengendalian Penduduk	250.000.100	DAU
9.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	7.706.345.000	DAU & DAK
10.	Program Pemberdayan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	6.119.500.000	DAU& DAK

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 Pagu Anggaran Rp. 19.788.906.891

Kendal, 30 Januari 2023

Pihak Kedua

DICO M. GANINDUTO

Pihak Pertama,

ALBERTUS HENDRI SETYAWAN, SP, MT
NIP. 19810522 200501 1 010

KABUPATEN KENDAL

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jenis : RKT
Tahun : 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Partisipasi Kelembagaan PUG dan PUHA	IPG (Indeks Pembangunan Gender)	93,1
2	Meningkatnya Penanganan Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak	Presentase Anak Korban kekersan yang ditangani instansi terkait kabupaten	100%
3	Meningkatnya Penanganan Kasus Perdagangan Orang dan Peningkatan Pemenuhan Hak anak dalam konsep KLA dan Perlindungan Anak Khusus	Rasio Kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 Penduduk Perempuan	20/100.000 penduduk perempuan
4	Meningkatnya Pemakaian Alat Kontrasepsi modern bagi PUS	Presentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/CPR)	70%
5	Peningkatan Layanan Kesertaan ber KB bagi PUS	Angka Kelahiran Total (TFR)	2,3
		Presentase Kebutuhan ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmeet Need)	13%

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN KENDAL

DP2KBP2PA

ALBERTUS HENDRI SETYAWAN, SP, MT
Pembina
NIP. 19810522 200501 1 010

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini:

Nama	:	DWI SIAMINTARSIH, S.KM.,M.Kes
Jabatan	:	Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana , Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal.

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama	:	ALBERTUS HENDRI SETYAWAN, SP, MT
Jabatan	:	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal.

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kendal, 2023

Pihak Kedua,

PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL DP2KBP2PA

ALBERTUS HENDRI SETYAWAN, SP, MT
NIP. 19810522 200501 1 010

Pihak Pertama,

DWI SIAMINTARSIH, S.KM.,M.Kes
NIP. 19651227 199103 2 006

PERJANJIAN KINERJA

No.	Program	Indikator Kinerja	Target
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Presentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	100
2.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	2. Presentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmeet Need)	13

No	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	84.296.000	DAU
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.472.570.454	DAU
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	55.704.000	
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	271.710.087	DAU
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	54.500.000	DAU
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	301.700.000	DAU
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	201.000.000	DAU
8.	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	62.965.000	DAU
9.	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	1.038.900.000	DAK Non Fisik

Kendal, 2023

Pihak Kedua,

ALBERTUS HENDRI SETYAWAN, SP, MT
NIP. 19810522 200501 1 010

Pihak Pertama,

DWI SIAMINTARSIH, S.KM., M.Kes
NIP. 19651227 199103 2 006

RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2023

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK , KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KAB. KENDAL

SEKRETARIS

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN				PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	RENCANA AKSI	ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB	JADWAL KEGIATAN													KET
		I	II	III	IV							TR I			TR II			TR III			TR IV				
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10													11
Meningkatnya Partisipasi Kelembagan PUG dan PUHA	Presentase kelengkapan penunjang urusan perangkat daerah	50	50	55	100	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																			
Meningkatnya Penanganan Kasus Kekerasan Perempuan dan anak						Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
Meningkatnya Penanganan Kasus Perdagangan orang dan Peningkatan Pemenuhan hak anak dalam konsep KLA dan Perlindungan Anak Khusus						1 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah dokumen tentang perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja	12 bulan	lancarnya pelaksanaan kegiatan tentang perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja	84 296 000	Perencana Ahli Muda Sub Koordinator PLP													
Meningkatnya Pemakaian Alat Kontrasepsi modern bagi PUS						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																			
						2 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran gaji ASN dan Tunjangan	12 bulan	Pembayaran gaji setiap bulan lancar	3 153 370 454	Perencana Ahli Muda Sub Koordinator PLP													
						3 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pembayaran Honorarium Penanggungjawab pengelolaan keuangan	12 bulan	Pembayaran Honor Pengelola keuangan	319 000 000	Perencana Ahli Muda Sub Koordinator PLP													
						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																			
						4 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 bulan	Lancarnya Pembayaran honor TPK	55 104 000	Kepubag Umpeg													
						Administrasi Umum Perangkat Daerah																			
						5 Penyediaan Perlengkapan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis ATK yang tersedia	17 Jenis	Pengadaan alat tulis kantor	97 000 000	Kepubag Umpeg													

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA TAHUN BERJALAN I	II	III	IV	PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	RENCANA AKSI	ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB	JADWAL KEGIATAN TRI 1	2	3	TRI 4	5	6	7	TRI 8	9	TRI 10	11	12	KET
						6 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah mengadakan makan dan minum pegawai tamu dan rapat	250 orang	Pembelian makan minum tamu dan rapat	25.000.000	Kasubbag Umpek													
						7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis barang cetakan yang disediakan	13 jenis	Pengadaan Barang Cetakan dan Penggandaan	17.710.000	Kasubbag Umpek													
						8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan yang disediakan	2 Jenis	Pembelian bahan bacaan	2.000.000	Kasubbag Umpek													
						9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan koordinasi dan konsultasi baik dalam maupun luar daerah	12 bulan	Pembelian BBM dan Biaya perjalanan Dinas Pegawai	175.000.087	Kasubbag Umpek													
						10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	Lancarnya pelaksanaan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	15.000.000	Kasubbag Umpek													
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																		
						11 Pengadaan Perlengkapan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan barang pada Perangkat	5 unit	Lancarnya pengadaan barang pada Perangkat	54.500.000	Kasubbag Umpek													
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																		
						12 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Bulan Penyelenggaraan Kegiatan Surat Menyurat	12 bulan	Pembelian materai dan Pengiriman surat	3.000.000	Kasubbag Umpek													
						13 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Penggunaan Fasilitas Telp , Air , Listrik untuk kegiatan perkantoran	12 bulan	Pembayaran Rekening Telpon, air memakai dan listrik	130.000.000	Kasubbag Umpek													
						14 Penyediaan Jasa Perawatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pemeliharaan mesin dan alat kantor	12 bulan	pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	27.000.000	Kasubbag Umpek													
						15 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan di bayarkannya honor penanggung jawab pengamanan kantor	12 bulan	Pemberian alat kebersihan dan pembayaran jasa kebersihan dan keamanan	142.000.000	Kasubbag Umpek													
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																		
						15 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah bulan pemeliharaan dan pelayanan dan mesin	37 kendaraan	Pemeliharaan Mesin dan Asset DP2KBP2PA	75.000.000	Kasubbag Umpek													
						16 Pemeliharaan Meubel	Jumlah pemeliharaan Meubelair	1 paket	Pemeliharaan mobiler	1.000.000	Kasubbag Umpek													

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN I	II	III	IV	PROGRAM, KEGIATAN , SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	RENCANA AKSI	ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB	JADWAL KEGIATAN TR I 1	2	3	TR 2 4	5	6	TR 3 7	8	9	TR 4 10	11	12	KET
						17 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan perawatan rutin gedung dan bangunan	1 gedung	Pemeliharaan aset gedung DP2KBP2PA	125.000.000	Kasubbag Umpek													
						Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal																	
						18 Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Jumlah ATK dan sarana yang terbeli	16 jenis	Terpenuhinya ATK dan sarana yang terbeli	172.200.000	Perencana Ahli Muda Sub Koordinator													
						19 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah peserta penyuluhan KKBPK	3000 orang	Peningkatan peserta penyuluhan KKBPK	866.700.000	Perencana Ahli Muda Sub Koordinator													
						Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)																		
						20 Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan ProgramKKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana(PKB/PLKB)	Jumlah pegawai dan petugas lapangan yang di bina	100 orang	Meningkanya Pegawai dan Petugas lapangan yan dibina	83.205.000	Kasubbag Umpek													

Mengetahui,
Kepala DP2KBP2PA

ALBERTUS HENDRI SETYAWAN, SP, MT
NIP. 19810522 200501 1 010

Kendal, 2023

Sekretaris DP2KBP2PA
Kabupaten Kendal

DWI SIAMINTARSIH, S.KM, M.Kes
NIP. 19651227 199103 2 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini:

Nama	:	BUDI SUPRAWITO, SKM
Jabatan	:	Kepala Bidang Keluarga Sejahtera dan Pembangunan Keluarga pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana , Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal.

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama	:	ALBERTUS HENDRI SETYAWAN, SP, MT
Jabatan	:	Kepada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana , Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kendal, 2023

PIHAK KEDUA,	PIHAK PERTAMA,
ALBERTUS HENDRI SETYAWAN, SP, MT	BUDI SUPRAWITO, SKM
NIP. 19810522 200501 1 010	NIP. 19650127 198611 1 001

PERJANJIAN KINERJA

No	Program	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	1. Prosentase kelompok masayrakat di Bidang Pemberdayan dan Peningkatan keluarga sejahtera yang di bina	65

No	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	25.000.000	DAU
2	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	280.000.000	DAU
3.	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	1.221.600.000	DAU dan DAK Non -Fisik
4.	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	6.119.500.000	DAU dan DAK Non -Fisik

Kendal, 2023

PIHAK KEDUA,

DP2KBP2PA

ALBERTUS HENDRI SETYAWAN, SP, MT
NIP. 19810522 200601 1 010

PIHAK PERTAMA,

BUDI SUPRAWITO, SKM
NIP. 19650127 198611 1 001

RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2023
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK , KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KAB. KENDAL
KEPALA BIDANG KS PK

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN					PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	RENCANA AKSI	ANGGRAN (Rp.)	PENANG GUNG JAWAB	JADWAL KEGIATAN											
		L	I	II	V								TR 1			TR 2			TR 3			TR 4		
													1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Meningkatkan Ketahanan Kesejahteraan, dan Kualitas Keluraga	Prosentase Kelompok Masyarakat di bidang Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera yang dibina	32	123	122	97	1	Program PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) Kegiatan : Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Tersedianya Biaya Operasional Stunting	445 Kegiatan	Penyediaan operasional stunting	5.765.500.000	Seksi Ketahanan, Kesejahteraan, dan Kualitas Keluarga												
		3	3	3	3	2	PROGRAV PENGENDALIAN PENDUDUK Kegiatan : Pemadiuan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah DaerahKabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Terbentuknya Sekolah Lansia	1 Desa	Terselenggaranya Sekolah bagi Lansia	25.000.000	Seksi Ketahanan, Kesejahteraan, dan Kualitas Keluarga												
				9	5	3	PROGRAM PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) Kegiatan : Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pemberdaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Terbinanya Kelompok BKB	15 Kelompok	Pembinaan kelompok BKB	200.000.000	Seksi Ketahanan, Kesejahteraan dan Kualitas Keluarga												

		4			4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS; Kegiatan : Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan	Terbinanya Kelompok UPPKA	4 Kelompok	Pembinaan kelompok UPPKA	50.000.000	Seksi Ketahanan, Kesejahteraan dan Kualitas Keluarga
		40			5	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS; Kegiatan : Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Tersedianya Sarana Kelompok kegiatan	40 kelompok	Terlaksanya Sarana Kelompok kegiatan	74.000.000	Seksi Ketahanan, Kesejahteraan dan Kualitas Keluarga
			3		6	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS; Kegiatan : Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Terbinanya Kelompok BKL	3 Kelompok	Pembinaan kelompok BKL	30.000.000	Seksi Ketahanan, Kesejahteraan dan Kualitas Keluarga
Meningkatkan Ketahanan, Kesejahteraan, dan Kualitas Keluarga	Proseniase Kelompok Masyarakat di bdang Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera yang dibina		2		7	Program : PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) Kegiatan : Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KBSesuai Kearifan Bucaya Lokal	Terlaksananya Kegiatan Advokasi, Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan dan KB sesuai kearifan Lokal / Apresiasi Duta Genre	20 Kec	Mempunyai generasi berencana yang berkualitas handal dan memiliki ifeskil yang bertanggung jawab dalam perencanaan berkeluarga	60.000.000	Seksi Advokasi dan Penggerakan

		1	4	5		8	PROGRAM Pembinaan KB Kegiatan : Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KBSesuai Kearifan Budaya Lokal	Terlaksananya Kegiatan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan dan KB sesuai kearifan Lokal	20 Kec	Mempunyai masyarakat yang berkualitas dalam ketahanan dan perencanaan keluarga	220.000.000	**Seksi Advokasi dan Penggerakan**
			5			9	Program : PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) Kegiatan : Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Meningkatkan pengetahuan dan Kemampuan dalam progam bangga kencana	20 Kec	Terbinanya kader IMP	60.000.000	Seksi Pendayagunaan PLKB dan Institusi Masyarakat Pedesaan
		3	3	3	3	10	PROGRAM PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) Kegiatan : Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Meningkatkan peran kader IMP dalam pelaksanaan Progam bangga kencana	1899 Orang	Terlaksananya progam bangga kencana	1.161.600.000	Seksi Pendayagunaan PLKB dan Institusi Masyarakat Pedesaan

Mengetahui
Kepala DP2KBP2PA Kab. Kendal

ALBERTUS HENDRI SETYAWAN, SP, MT
NIP. 19810522 200501 1 010

Kendal, 2023
Kabid KSPK DP2KBP2PA
Kabupaten Kendal

BUDI SUPRAWITO,SKM
NIP. 196501271986111001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini:

Nama	:	VERONICA ASIH ANGGRAENI, SKM
Jabatan	:	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana , Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal.

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama	:	ALBERTUS HENDRI SETYAWAN, SP, MT
Jabatan	:	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kendal, 2023

PIHAK KEDUA,	PIHAK PERTAMA,
ALBERTUS HENDRI SETYAWAN, SP, MT	VERONICA ASIH ANGGRAENI, SKM
NIP. 19810522 200501 1 010	NIP. 19650426 198812 2 001

PERJANJIAN KINERJA

No.	Program	Indikator Kinerja	Target
1. 2.	Program Pengendalian Penduduk Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	1. Prosentase Penurunan Usia Dini 2. Presentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmeet Need)	20 13

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	225.000.100	DAU
2.	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	4.352.880.000	DAK Fisik dan DAK Non Fisik
3.	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	750.000.000	DAU dan DAK Non Fisik

Kendal, 2023

PIHAK KEDUA,

ALBERTUS HENDRI SETYAWAN, SP, MT
NIP. 19810522 200501 1 010

PIHAK PERTAMA,

VERONICA ASIH ANGGRAENI, SKM
NIP. 19650426 198812 2 001

RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2023
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK , KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KAB. KENDAL
KEPALA BIDANG KB

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASAR					PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	RENCANA AKSI	ANGGRAN (Rp.)	PENANG GUNG JAWAB	JADWAL KEGIATAN											
		I	II	III	IV								TR 1			TR 2			TR 3			TR 4		
													1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Mengendalikan Jumlah Penduduk dan Meningkatkan kualitas Penduduk	Pengendalian Jumlah Penduduk	10	1			1	PROGRAM Pengendalian Penduduk KLGIATAN Pemanduan dan Singkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	1 Terwujudnya Sekolah Siaga Kependudukan	20 Sekolah	Murid memahami Kependudukan dan Mempunyai Sikap dan Perilaku Yang Bertanggung Jawab Yang Berkaitan Dengan Kependudukan dan Perencanaan Keluarga	225 000 000	Subkor Dalduk dan Informasi Keluarga											
		250	50					2 Mewujudkan kepingan masyarakat untuk ber KB	5 Kegiatan	Masyarakat memahami arti pentingnya kul program KB		Subkor Dalduk dan Informasi Keluarga												
		430	400	430	400	2	PROGRAM Pembinaan KB KEGIATAN Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Ketentuan Ber-KB	Menurunkan angka kematian ibu dan bay	1600 orang	Membantu menurunkan angka kematian ibu	70 300 000	Subkor Pembinaan Ketentuan Ber KB												
		1150	1150	1150	1150	3	PROGRAM Pembinaan KB KEGIATAN Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Oserah Kabupaten/Kota	Meningkatkan jumlah aksepter kesertaan penggunaan KB MKJP	4 kegiatan	Meningkatnya kesertaan pelayanan Ber KB Terpenuhinya pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi ke faskes	4 352 895 000	Subkor Pembinaan Ketentuan Ber-KB												

		45	45	45	45	5	PROGRAM Pembinaan KB KEGIATAN : Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Kampung KB yang mengikuti pelaksanaan dan pengelolaan bangga kencana di kampung KB	1 Kegiatan	Terlaksananya program bangga kencana di kampung KB	660.000.000	Subkor Jaminan Ber-KB	
		21	21			6	PROGRAM Pembinaan KB KEGIATAN : Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Pembinaan kampung KB	2 Kegiatan	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta organisasi masyarakat	20.000.000	Subkor Jaminan Ber-KB	

Mengetahui
Kepala DP2KBP2PA Kab. Kendal

ALBERTUS HENDRI SETYAWAN, SP. MT
NIP. 19810522 200501 1 010

Kendal,
Kabid KB DP2KBP2PA
Kabupaten Kendal

Veronica Asih Anggraini, SKM
NIP. 196504261988122001

PERJANJIAN KINERJA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : SYAIFUL HUDA, ST,MA

Jabatan : Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana , Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal.

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : ALBERTUS HENDRI SETYAWAN, SP, MT

Jabatan : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kendal, 30 Januari 2023

PIHAK KEDUA,

ALBERTUS HENDRI SETYAWAN, SP, MT
NIP. 19810522 200501 1 010

PIHAK PERTAMA,

SYAIFUL HUDA, ST,MA
NIP. 197412032006041006

PERJANJIAN KINERJA

No.	Program	Indikator Kinerja	Target
1	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	1 Prosentase OPD yang mengimplementasikan PUG	75
2	Program Perlindungan Perempuan	2. Presentase kekerasan terhadap perempuan yang ditangani	100
3	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	3. Prosentase lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga yang dibina	100
4	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	4. Prosentase OPD yang memiliki Data Pilah Gender	100
5.	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	5. Prosentase Kecamatan Layak Anak	65
6	Program Perlindungan Khusus Anak	6. Presentase kekerasan pada anak yang ditangani	100

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	128.000 000	DAU
2.	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	9' 000.000	DAU
3.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	426.065.000	DAU
4.	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	196.000 000	DAU
5	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	20.000 000	DAU
6	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	122.000 000	DAU
7	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	78.416.250	DAU
8	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	50 000 000	DAU
9	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	40 000.000	DAU
10.	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	29 000.000	DAU

11.	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	90.000.000	DAU

Kendal, 30 Januari 2023

PIHAK KEDUA,

ALBERTUS HENDRI SETYAWAN, SP, MT
NIP. 19810522 200501 1 010

PIHAK PERTAMA,

SYAIFUL HUDA, ST,MA
NIP. 197412032006041006

RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2023
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KAB KENDAL
KEPALA BIDANG PPPA

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TGET KINERJA SASAR				PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	RENCANA AKS-	ANGGRAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB	JADWAL KEGIATAN											
		I	II	III	IV							TR 1			TR 2			TR 3			TR 4		
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Meningkatnya partisipasi PUG dan PUHA	IPG				93	**PROGRAM: PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**																	
						Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup AnakKewenangan Kabupaten/Kota																
						Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	SDM pada Perangkat Daerah mengikuti Pelatihan PPRG	Peserta mampu menganalisis anggaran dengan GAP dan GBS	Pelatihan PPRG Bagi SDM OPD di Kabupaten Kendal	49 000 000	Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Pengarusutamaan Gender dan Pemenuhan Hak Anak											
						Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah KewenanganKabupaten/Kota																
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Terbentuknya komitmen dan terimplementasinya Desa yang Ramah Perempuan dan Peduli Anak	2 DRPPA	-Pembentukan Komitmen Penyusunan data pilah gender dan anak - Mendorong Perda Perlindungan Anak - Pelaksanaan Pelatihan - Monitoring Sosialisasi kepada masyarakat terkait DRPPA (anggaran DPR 2 gerak)	78 000 000	Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Pengarusutamaan Gender dan Pemenuhan Hak Anak											

Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya kapasitas Pengurus Forum Anak	Terselenggaranya 2P bagi PA	- Raker tim pembina - Pelatihan 2P Kesehatan, Lingkungan, Kependudukan	25.000.000	Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Pengarusutamaan Gender dan Pemenuhan Hak Anak	
PROGRAM: PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA						
Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak TingkatDaerah Kabupaten/Kota						
Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi KeluargaKewenangan Kabupaten/Kota	- Pembentukan PUSPAGA - peningkatan kapasitas pengurus	-Puspaga - Pengurusnya	Rapat dengan dinas terkait - Rapat Pembentukan - Pelaksanaan kegiatan PUSPAGA Sosialisasi adanya PUSPAGA di Kab Kendal kepada masyarakat	74.000.000	Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Pengarusutamaan Gender dan Pemenuhan Hak Anak	
Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Korban kekerasan yang mendapatkan advokasi dan bantuan hukum	1 Dokumen	Meningkatkan Pelayanan kepada Korban kekerasan yang mendapatkan advokasi dan bantuan hukum	48.000.000	Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Perlindungan Perempuan dan Anak	
PROGRAM: PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK						

					Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						
					Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya data	3 dokumen	- Rapat dengan penyedia barang - Pembentukan Tim teknis dan tim pendukung - penyelesaian administrasi pengadaan	76 446 250	Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Pengarusutamaan Gender dan Pemenuhan Hak Anak	
Meningkatnya Penanganan Kasus Kekerasan Perempuan dan anak Meningkatnya Penanganan Kasus		20	45	75	00	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**					
						Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota					
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil koordinasi dan singkronisasi pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan	10 Dokumen	- sosialisasi penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak Perluasan penjangkauan dan penambahan jejaring untuk penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak	135 000 000	Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Perlindungan Perempuan dan Anak	
						Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota						
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi singkronisasi bagi perempuan korban kekerasan	10 Layanan	Meningkatkan Pelayanan kepada perempuan Korban kekerasan	20 000 000	Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Perlindungan Perempuan dan Anak	

| | | |

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini:

Nama	:	AZAR ZARAIDA NURAFNI, S Sos
Jabatan		SubKoordinator Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana , Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama	:	DWI SIAMINTARSIH, S KM., M.Kes
Jabatan	:	Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana , Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal

Selaku atasan pihak pertama selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kendal 30 Januari 2023

PIHAK KEDUA

DWI SIAMINTARSIH, S.KM ,M.Kes
NIP. 19650227 199103 2 006

PIHAK PERTAMA

AZAR ZARAIDA NURAFNI
NIP. 197304172006042005

PERJANJIAN KINERJA

No	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	84.296.000	DAU
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3 472 570.454	DAU
3	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Loka	1 038 900 000	DAK Non Fisik

No	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	84.296 000	DAU
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3 153 570.454	DAU
3	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	319 000 000	DAU
4	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	172 200 000	DAK Non Fisik
5	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	866 700 000	DAK Non Fisik

Kendal, 30 Januari 2023

PIHAK KEDUA

DWI SIAMINTARSIH, S.KM.,M.Kes
NIP. 19651227 199103 2 006

PIHAK PERTAMA,

AZAR ZARAIDA NURAHN
NIP. 197904172006042005

RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2023

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK , KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KAB. KENDAL

PERENCANA AHLI MUDA SUB KOORDINATOR PERENCANAAN DAN KEUANGAN

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN				PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	PENILAIAN AKSI	ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB	JADWAL KEGIATAN												KET
			II	III	IV							TW I			TW II			TW III			TW IV			
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10												11
Meningkatnya Partisipasi Kelompogan PUG dan PUHA	Presentase keterlibatan perempuan pengurus urusan perangkat daerah	80	85	95	100	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																		
Meningkatnya Penanganan Kasus Kekerasan Perempuan dan anak						Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
Meningkatnya Penanganan Kasus Perdagangan orang dan Peningkatan Pemenuhan Hak anak dalam konsep KLA dan Perlindungan Anak Khusus						1 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah dokumen tentang perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja	12 bulan	tersedianya pelaksanaan kegiatan tentang perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja	54.296.000	Perencana Ahli Muda Sub Koordinator PEP												
Meningkatnya Pemakaian Alat Kontrasepsi modern bagi PUS						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																		
						2 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran gaji ASN dan Tunjangan	12 bulan	Pembayaran gaji sesuai bulan berjalan	3.153.570.454	Perencana Ahli Muda Sub Koordinator PEP												
						3 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pembayaran Honorarium Penanggungjawab pengelolaan keuangan	12 bulan	Pembayaran Honor Pengelola keuangan	312.000.000	Perencana Ahli Muda Sub Koordinator PEP												

	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB berbasis Kearifan Budaya Lokal						
4	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Jumlah ATK dan sarana yang terbeli	16 jenis	Terpenuhinya ATK dan sarana yang terbeli	172 200 000	Perencana Ahli Muda Sub Koordinator PEP	
5	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah peserta penyuluhan KKBPK	3000 orang	Peningkatan peserta penyuluhan KKBPK	868 700 000	Perencana Ahli Muda Sub Koordinator PEP	

Kendal, 30 [illegible]

Perencana Ahli Muda Sub Koordinator PEP
DP2KBP2PA Kabupaten Kendal

AZAR ZARKASIA NURAENI
NIP 19790417200604 2 006

Sekretaris DP2KBP2PA
Kabupaten Kendal

OKI ISAMINTARSIH, S.KM, M.Kes
NIP 1985 [illegible]

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang berlandatangan dibawah ini:

Nama	:	SUMARNO, SE
Jabatan	:	Analis Kebijakan Ahli Muda Pendayagunaan PLKB dan IMP pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana , Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal.

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama	:	BUDI SUPRAWITO, SKM
Jabatan	:	Kepala Bidang Keluarga Sejahtera dan Pembangunan Keluarga pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana , Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kendal, 2023

PIHAK KEDUA,	PIHAK PERTAMA,
BUDI SUPRAWITO, SKM	SUMARNO, SE
NIP. 19650127 198611 1 001	NIP. 196512121986031016

PERJANJIAN KINERJA

No	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	1 221.600 000	DAU dan DAK Non -F sik

No	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	60 000 000	DAU
2.	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1.161.600.000	DAK Non - Fisik

Kendal. 2023

PIHAK KEDUA,

BUDI SUPRAWITO, SKM
NIP. 19650127 198611 1 001

PIHAK PERTAMA,

SUMARNO, SE
NIP. 196512121986031016

RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2023

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KAB. KENDAL

Kepala Seksi Pendayagunaan PLKB dan Institusi Masyarakat Pedesaan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN				PROGRAM DAN KEGIATAN		INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	RENCANA AKSI	ANGGARAN (Rp.)	PENANGGUNG JAWAB	JADWAL KEGIATAN										
		I	II	III	IV								TR 1			TR 2			TR 3			TR 4		
													1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Meningkatkan Ketahanan Kesejahteraan dan Kualitas Keluarga	Prosentase Kelompok Masyarakat di bidang Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera yang dibina		5			1	Program PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) Kegiatan : Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Meningkatkan pengetahuan dan Kemampuan calat progam bangga kencana	20 Kec	Terbinanya kader IMP	60.000.000	Seksi Pendayagunaan PLKB dan Institusi Masyarakat Pedesaan												
						2	PROGRAM PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Meningkatkan peran kader IMP calam pelaksanaan Progam bangga kencana	1899 Orang	Terlaksananya progam bangga kencana	1.161.600.000	Seksi Pendayagunaan PLKB dan Institusi Masyarakat Pedesaan												

Mengetahui
Kabid KS PK DP2KBP2PA Kab. Kendal

SUDI SUPRAYITO,SKM
NIP 196501271986111001

Kendal,
Kasi Pendayagunaan PLKB dan Institusi Masyarakat Pedesaan
Kabupaten Kendal

SUMARNO, SE
NIP 196512121990021016

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini:

Nama	:	SITI AULIA RAHMAH,S.Kom., MM
Jabatan		Analis Kebijakan Ahli Muda Ketahanan, Kesejahteraan dan Kualitas Keluarga pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana , Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal.

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama		BUDI SUPRAWITO, SKM
Jabatan	:	Kepala Bidang Keluarga Sejahtera dan Pembangunan Keluarga pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana , Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal.

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Kendal, 2023

PIHAK PERTAMA,	PIHAK PERTAMA,
BUDI SUPRAWITO, SKM	SITI AULIA RAHMAH,S Kom , MM
NIP. 19650127 198611 1 001	NIP. 197912072003122003

PERJANJIAN KINERJA

No	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	25 000.000	DAU
2.	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	6 119.500 000	DAU dar DAK Non -Fisik

No	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	25.000.000	DAU
2	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	74.000.000	DAU
3.	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	200.000.000	DAU
4	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Kotahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB. BKR, BKL, PPKS. PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Kkeluarga/UPPKS)	50.000 000	DAU
5.	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	5.765.500.000	DAK Non - Fisik
6.	Promosi dan Sosialisasi kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Kkeluarga/UPPKS)	30 000.000	DAU

Kendal, 2023

PIHAK KEDUA,

BUDI SUPRAWITO, SKM
NIP. 19650127 198611 1 001

PIHAK PERTAMA,

SITI AULIA RAHMAH,S.Kom. MM
NIP 19791207200312 20

RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2023

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KAB KENDAL

Kepala Seksi Seksi ketahanan, Kesejahteraan dan Kualitas Keluarga

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN					PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	RENCANA AKSI	ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB	JADWAL KEGIATAN											
		I	II	III	IV								TR 1		TR 2				TR 3			TR 4		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
													13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Meningkatkan Ketahanan Kesejahteraan, dan Kualitas Keluarga	Prosentase Kelompok Masyarakat di bidang Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera yang dibina	37	123	122	97	1	Program PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS). Kegiatan : Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Tersedianya Biaya Operasional Stunting	446 Kegiatan	Penyediaan operasional stunting	5.755.500.000	Seksi ketahanan, Kesejahteraan dan Kualitas Keluarga												
		1	2	3	3	2	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK Kegiatan : Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Terbentuknya Sekolah Lansia	1 Desa	Terselenggaranya Sekolah bagi Lansia	25.000.000	Seksi ketahanan, Kesejahteraan, dan Kualitas Keluarga												

		5	6	3	PROGRAM PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Terbinanya Kelompok BKB	15 Kelompok	Pembinaan kelompok BKB	200.000.000	Seksi Ketahanan, Kesejahteraan, dan Kualitas Keluarga	
	4			4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Terbinanya Kelompok UPPKA	4 Kelompok	Pembinaan kelompok UPPKA	50.000.000	Seksi Ketahanan, Kesejahteraan, dan Kualitas Keluarga	
	40			5	PROGRAM PEVBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Tersedianya Sarana Kelompok kegiatan	40 kelompok	Tercukupinya Sarana Kelompok kegiatan	44.000.000	Seksi Ketahanan, Kesejahteraan, dan Kualitas Keluarga	

			1	6	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Terbinanya Kelompok BKL	3 Kelompok	Pembinaan kelompok BKL	30.000.000	Sekda Ketahanan, Kesejahteraan dan Kualitas Keluarga	[redacted]

Mengetahui
Kabid KS PK DP2KBP2PA Kab. Kendal

DUDI SUPRAWITO,SKM
NIP. 19650827 198611001

Kendal 2023
Kepala Ketahanan, Kesejahteraan, dan Kualitas Keluarga
Kabupaten Kendal

S TIADJA RAHMAH, S.Kom. M.M
NIP 19791207200312200?

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini:

Nama	:	SUDARNI. S.Sos.,M.M.
Jabatan	:	Analis Kebijakan Ahli Muda Advokasi dan Penggerakan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana . Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama	:	BUDI SUPRAWITO, SKM
Jabatan	.	Kepala Bidang Keluarga Sejahtera dan Pembangunan Keluarga pada Dinas Pengendalian Penduduk. Keluarga Berencana , Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal.

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kendal, 2023

PIHAK KEDUA,	PIHAK PERTAMA,
BUDI SUPRAWITO, SKM	SUDARNI. S.Sos ,M.M.
NIP. 19650127 198611 1 001	NIP. 1970092419930320

PERJANJIAN KINERJA

No	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	280.000.000	DAU

No	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	220.000.00	DAU
2.	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan elektronik serta Media Luar ruang	60.000.000	DAU

Kendal, 2023

PIHAK KEDUA.

BUDI SUPRAWITO, SKM
NIP. 19650127 198611 1 001

PIHAK PERTAMA.

SUDARNI, S.Sos.,M.M.
NIP. 19700924 19930320

RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2023

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK , KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KAB KENDAL

Kepala Seksi Advokasi dan Penggerakan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN				PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	RENCANA AKSI	ANGGARAN (Rp.)	PENANGGUNG JAWAB	JADWAL KEGIATAN											
		I	II	III	IV							TR 1			TR 2			TR 3			TR 4		
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Meningkatkan Kesehatan Kesejahteraan, dan Kualitas Keluarga	Prosentase Kelompok Masyarakat di bidang Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera yang dibina		2			1 Program : PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB). Kegiatan : Pelaksanaan Advokasi , Komunikasi , Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KBSesuai Kearifan Budaya Lokal	Terlaksanannya Kegiatan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan dan KB sesuai kearifan Lokal / Apresiasi Duta Genre	20 Kec	Meningkatnya generasi berencana yang berkualitas handal dan memiliki life skil yang bertanggung jawab dalam perencanaan berkeluarga	60.000.000	Seksi Advokasi dan Penggerakan											
		1	4	5		PROGRAM Pembinaan KB Kegiatan : Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KBSesuai Kearifan Budaya Lokal	Terlaksanannya Kegiatan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan dan KB sesuai kearifan Lokal	20 Kec	Kemampuan masyarakat yang berkualitas dalam kesehatan dan perencanaan keluarga	220.000.000	Seksi Advokasi dan Penggerakan											

Mengetahui

Kabid KS PK OR2KBP2PA Kab. Kendal

BUDI SUPRAWITO,SKM

NIP. 19650127 198501 1 001

Kendal,

Kasi Seksi Advokasi dan Penggerakan

Kabupaten Kendal

SUDARNI, S.Sos, M.M

NIP. 19720921 199303 2 008

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini

Nama	:	SUTAPA, SH
Jabatan	:	Analis Kebijakan Ahli Muda Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana . Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal.

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama	:	SYAIFUL HUDA, ST,MA
Jabatan	:	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana , Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan saniksi.

Kendal, 30 Januari 2023

PIHAK KEDUA,	PIHAK PERTAMA.
SYAIFUL HUDA, ST,MA	SUTAPA, SH
NIP. 197412032006041006	NIP.196503131986031013

PERJANJIAN KINERJA

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	91.000.000	DAU
2	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	426.065.000	DAU

No	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik,Hukum, Sosial dan Ekonomi	91.000.000	DAU
2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	86.565.000	
3	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	100.000.000	DAU
4.	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	239.500.000	DAU

Kendal, 30 JANUARI 2023

PIHAK KEDUA,

SYAIFUL HUDA, ST,MA
NIP 197412032006041006

PIHAK PERTAMA,

SUTAPA, SH
NIP 196503131986031013

RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2023
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KAB. KENDAL
Sub Koordinator PKHP

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN				PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	RENCANA AKSI	ANGGARAN (Rp.)	PENANGGUNG JAWAB	JADWAL KEGIATAN									
		I	II	II	IV							TR 1			TR 2			TR 3			
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2	3	4	5	5	7	8	9	10	11	12										
Meningkatkan kualitas Hidup Perempuan	Kualitas Hidup Perempuan					Program : Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Kegiatan : Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Partisipasi perempuan bidang politik hukum sosial dan ekonomi pada organisasi masyarakat	29 Organisasi perempuan se Kab. Kendal	memberikan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum Sosial dan Ekonomi pada organisasi masyarakat 4 Kal Keg. (1.Bid.Politik 2.Bid Hukum Bid Sosial 4 Bid Ekonomi)	91 000 000	Seksi Peningkatan kualitas hidup perempuan									
						PROGRAM Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Kegiatan : Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan pada lembaga penyedia layanan pemberdayan perempuan	2 Lembaga (DWP dan GOW) Kab Kendal	Meningkatkan partisipasi peran perempuan serta dan kesetaraan Gender dalam pembangunan (DWP ada 5 Keg, GOW ada 7 Keg dan Han Kartini dan PHJ)	239 500 000	Seksi Peningkatan kualitas hidup perempuan									

	PROGRAM Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	4 Kelompok Industri Rumahan wil Kecamatan	Membentuk Kelompok IR Tk Kabupaten Kecamatan dan desa Memberikan pembinaan dan pendampingan industri rumahan (1 Ds Wacas Plantungan, Ds Gening Gunung Sukorejo, Ds Teralenuyu Weleri 4 KelArgenhayo Kec Kendal)	100 000.000	Sekali Peningkatan kualitas hidup perempuan
	PROGRAM Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	1 Lembaga GOW Kab Kendal (29 Organisasi Wanita)	memberikan sosialisasi Informasi Kebijakan dan memberikan Pendampingan (3 kali kegiatan)	86 505 300	Sekali Peningkatan kualitas hidup perempuan

Mengetahui
Kepala KB DP2KBP2PA Kab. Kendal

SYAIFUL HUDA, S.T, M.A
NIP. 197412032006041005

Kendal, 30/10/2023
Sub Koordinator Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan
Kabupaten Kendal

SUTAPA, SH
N.P. 196503131986032013

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini:

Nama	:	HERNAWATI SUNINDRINI, SE
Jabatan	:	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana , Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama	:	DWI SIAMINTARSIH, S.KM.,M.Kes
Jabatan	:	Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana , Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal.

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kendal, 30 Januari 2023

PIHAK KEDUA,	PIHAK PERTAMA,
DWI SIAMINTARSIH, S.KM.,M.Kes	HERNAWATI SUNINDRINI, SE
NIP. 19651227 199103 2 006	NIP.19680205 201406 2 001

PERJANJIAN KINERJA

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
	Monitoring, Evaluasi. dan Penilaian Kinerja Pegawai	55.704.000	DAU
2.	Administrasi Umum Perangkat Daerah		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	37.000.000	DAU
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.000.000	DAU
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	17 710.000	DAU
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.000.000	DAU
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	175.000.087	DAU
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	15.000.000	DAU
3.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	54.500 000	DAU
4.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 000 000	DAU
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	130.000.000	DAU
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	27.800.000	DAU
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	140 900 000	DAU
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	75.000.000	DAU
	Pemeliharaan Mebel	1 000 000	DAU
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	125.000.000	DAU

6.	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)		
	Penguatan Pelaksanaan Penyuluh, Penggerakan, Pelayanan dan Penegmbangan Program KKBPK untuk Petugas KB/Penyuluh Lapangan KB (PKB/PLKB)	62.965.000	DAU

Kendal, 30 Januari 2023

Pihak Kedua,

DWI SIAMINTARSIH, S.KM.,M.Kes
NIP. 19651227 199103 2 006

PIHAK PERTAMA,

HERNAWATI SUNINDRINI, SE
NIP.19680205 201406 2 001

RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2023

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK , KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KAB. KENDAL

KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN				PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	PENCANAAKAN	ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB	JADWAL KEGIATAN												KET
		I	II	II	V							TW I			TW II			TW III			TW IV			
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10												11
Meningkatnya Partisipasi Kelembagan PUG dan PUHA	Presentase ketercapaian penunjang urusan perangkat daerah	80	90	95	100	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**																		
Meningkatnya Penanganan Kasus Kekerasan Perempuan dan anak						**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**																		
Meningkatnya Penanganan Kasus Perdagangan orang dan Peningkatan Pemenuhan Hak anak dalam konteks KLA dan Perlindungan Anak Khusus						1 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 bulan	Lancarnya Pembayaran Honor TPK	55.764.000	Kasubbag Umpek													
Meningkatnya Penyediaan Alat Kontrasepsi modern bagi PUS						**Administrasi Umum Perangkat Daerah**																		
						2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis ATK yang dibeli	57 Jenis	Pengadaan alat tulis Kantor	27.000.000	Kasubbag Umpek													
						3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah mengadakan makan dan minum pegawai lembur dan rapat	250 orang	Pembelian makan minum lembur dan rapat	25.000.000	Kasubbag Umpek													
						4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis barang cetakan yang disediakan	12 jenis	Pengadaan Barang Cetakan dan Penggandaan	17.710.000	Kasubbag Umpek													
						5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Jumlah jenis bahan bacaan yang disediakan	2 Jenis	Pembelian bahan bacaan	2.000.000	Kasubbag Umpek													
						6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan koordinasi dan konsultasi baik dalam maupun luar daerah	12 bulan	Pembelian BBM dan Biaya perjalanan Dinas Pegawai	115.300.082	Kasubbag Umpek													
						7 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	Lancarnya pelaksanaan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	15.000.000	Kasubbag Umpek													
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																		
						8 Pengadaan Perlengkapan dan Mebel Lainnya	Jumlah pengadaan barang pada Perangkat	6 unit	Lancarnya pengadaan barang pada Perangkat	84.900.000	Kasubbag Umpek													

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN				PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	RENCANA AKSI	ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB	JADWAL KEGIATAN												KET
		I	II	III	V							TW I			TW II			TW III			TW IV			
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																		
						9 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Bulan Pelayanan Kegiatan Surat Menyurat	12 bulan	Pembelian meterai dan Pengiriman surat	3.000.000	Kasubbag Umpek													
						10 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Penggunaan Fasilitas Telp, Air, dan listrik kegiatan perkantoran	12 bulan	Pembayaran Listrik, air, internet dan telepon	120.000.000	Kasubbag Umpek													
						11 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pemeliharaan mesin dan alat kantor	12 bulan	pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	27.000.000	Kasubbag Umpek													
						12 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan di bayarkannya tenaga cleaning, driver dan pengamanan kantor	12 bulan	Pembelian alat kebersihan dan pembayaran jasa kebersihan dan keamanan	149.000.000	Kasubbag Umpek													
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																		
						13 Penyelenaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	Jumlah bulan pemeliharaan rutin peralatan dan mesin	97 kendaraan	Pemeliharaan Mesin dan gasi DP2KBP2PA	75.000.000	Kasubbag Umpek													
						14 Pemeliharaan Meja	Jumlah pengeluaran Meubeler	1 paket	Pemeliharaan meubeler	1.000.000	Kasubbag Umpek													
						15 PemeliharaanRehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan rutin gedung dan bangunan	1 gedung	Pemeliharaan gedung DP2KBP2PA	125.000.000	Kasubbag Umpek													
						20 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu, Penggantian Pakaian dan Perlengkapan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana(PKB/PLKB)	Jumlah pegawai dan petugas lapangan yang di beri	100 orang	Memenuhkanya Pegawai dan Petugas lapangan yang diberi	85.205.000	Kasubbag Umpek													

Kendal, [illegible] 2023

Mengetahui
Sekretaris DP2KBP2PA

DWI SUMINTARSIH, S.KM.,M.Kes
NIP. 19691227 199103 2 006

Kasubbag UMPEG DP2KBP2PA
Kabupaten Kendal

HERNAWATI SUNINDRINI, SE
NIP. 19880205 201406 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini

Nama	:	ROCHATUN, S.Sos
Jabatan	:	Kepala Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana , Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama	:	VERONICA ASIH ANGGRAENI, SKM
Jabatan	:	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana , Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal.

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini. dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kendal, [illegible] 2023

PIHAK KEDUA,	PIHAK PERTAMA,
VERONICA ASIH ANGGRAENI, SKM	ROCHATUN, S.Sos.
NIP. 19650426 198812 2 001	NIP. 196512101986032022

PERJANJIAN KINERJA

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	225.000.100	DAU
2.	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	2.015.620.000	DAK Fisik

No	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	225.000.100	DAU
2	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	2.015.620.000	DAK Fisik

Kendal, 30 Januari 2023

PIHAK KEDUA,

VERONICA ASIH ANGGRAENI, SKM
NIP. 19650426 198812 2 001

PIHAK PERTAMA,

ROCHATUN, S.Sos
NIP. 19651210198603 2022

RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2023
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KAB. KENDAL
Subkoor Dalduk dan Informasi Keluarga

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASAR				PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	RENCANA AKSI	ANGGRAN (Rp.)	PENANG GUNG JAWAB	JADWAL KEGIATAN										
		I	II	III	IV								TR 1			TR 2			TR 3			TR 4	
													1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Meningkatkan kualitas pelayanan keluarga berencana	Pelayanan KB di desa	15	4			1	PROGRAM Pengendalian Penduduk KEGIATAN : Pemandugan dan Singkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk. SUB KEGIATAN : Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	1 Terwujudnya Sekolah Siaga Kependudukan	20 Sekolah	Mind memahami Kependudukan dan Mempunyai Skap dan Perilaku Yang Bertanggung Jawab Yang Berkaitan Dengan Kependudukan dan Perencangan Keluarga	75 000 000	Subkor Dalduk dan Informasi Keluarga										
		250	50					2 Mewujudkan kesiapan masyarakat untuk ber KB	6 Kegiatan	Masyarakat memahami arti pentingnya ikut program KB	150 000 000	Subkor Dalduk dan Informasi Keluarga												

Kendal, 30 Januari 2023

Mengetahui
Kabid KB DP2KBP2PA Kab. Kendal

Veronika Ash Anggraeni, SKM
NIP. 196504261988122001

Sub Koordinator Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga
Kabupaten Kendal

Rochmatun S, Ses
NIP. 196512201986032022

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini:

Nama	:	TUT HENIYARSIH, S.S.T.Keb.,M.Si
Jabatan	:	Kepala Seksi Jaminan ber Keluarga Berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana , Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama	:	VERONICA ASIH ANGGRAENI, SKM
Jabatan	:	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana , Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal.

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kendal, 30 Januari 2023

PIHAK KEDUA,	PIHAK PERTAMA,
VERONICA ASIH ANGGRAENI, SKM	TUT HENIYARSIH, S.S.T.Keb .M Si
NIP 19650426 198812 2 001	NIP. 197201261992032004

PERJANJIAN KINERJA

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	680.000.000	DAU dan DAK Non Fisik

No	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	660.000.000	DAK Non Fisik
2	Pembinaan Terpadu Kampung KB	20.000.000	DAU

Kendal, 30 Januari 2023

PIHAK KEDUA,

VERONICA ASIH ANGGRAENI, SKM
NIP. 19650426 198812 2 001

PIHAK PERTAMA,

TUT HENIYARSIH, S.S.T Keb, M.Si
NIP. 19720126 1992032004

RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2023
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KAB. KENDAL
Subkoor Jaminan Ber-KB

SASARAN STRATEGIS	IND KATOR KINERJA	RGET KINERJA SASARU					PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	IND KATOR KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	RENCANA AKSI	ANGGRAN (Rp.)	PENANG GUNG JAWAB	JADWAL KEGIATAN											
			II	III	IV								TR 1			TR 2			TR 3			TR 4		
													1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Meningkatkan kualitas pelayanan Keluarga Berencana	Pelayanan KB di desa	1	1	1	1	1	PROGRAM Pembinaan KB KEGIATAN Pengendalian dan Pendistribusian Kontrasepsi Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota SUB KEGIATAN Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Meningkatkan jumlah akseptor kesertaan penggunaan KB MKJP	4 Kegiatan	Terpenuhinya pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi ke faskes	2.237.260.000	Subkoor Jaminan Ber-KB												
		45	45	45	45	2	PROGRAM Pembinaan KB KEGIATAN Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB SUB KEGIATAN Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Kampung KB yang mengikuti pelaksanaan dan pengelolaan bangga kencana di kampung KB	1 Kegiatan	Terlaksananya program bangga kencana di kampung KB	000.000.000	Subkoor Jaminan Ber-KB												
		21	21			3	PROGRAM Pembinaan KB KEGIATAN Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pemenuhan Kesertaan Ber-KB SUB KEGIATAN Pembinaan Terpadu Kampung KB	Pembinaan kampung KB	2 Kegiatan	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta organisasi masyarakat	20.000.000	Subkoor Jaminan Ber-KB												

Kendal, 20 Januari 2023

Mengetahui
Kabid KH DP2KBP3PA Kab. Kendal

Veronica Asri Anggraini, SKM
NIP. 19850426 [illegible] 2001

Sub Koordinator Jaminan Ber-KB
Kabupaten Kendal

Tuz Hemyersah, S.S.I.Kes
NIP. 19720126 [illegible] 2004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini:

Nama	:	PENI YUNIWATI, S.S.T.Ke
Jabatan	:	Kepala Seksi Pembinaan Kesertaan Ber Kb pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana , Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama	:	VERONICA ASIH ANGGRAENI, SKM
Jabatan		Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana , Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal.

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kendal, [illegible] 2023

PIHAK KEDUA,	**PIHAK PERTAMA,**
VERONICA ASIH ANGGRAENI, SKM	PENI YUNIWATI, S.S.T.Ke
NIP. 19650426 198812 2 001	NIP 197406212006042O

PERJANJIAN KINERJA

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	2.337.260.000	DAK Non Fisik
2.	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	70.000.000	DAU

No	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	2.337.260.000	DAK Non Fisik
2	Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	70.000.000	DAU

Kendal, 2 Januari 2023

PIHAK KEDUA,

VERONICA ASIH ANGGRAENI, SKM
NIP. 19650426 198812 2 001

PIHAK PERTAMA,

PENI YUNIWATI,S.S.T.Ke
NIP 197406212006042

RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2023
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK , KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KAB. KENDAL
Subkor Pembinaan Keserlaan Ber KB

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASAR				PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	RENCANA AKSI	ANGGRAN (Rp.)	PENANGGUNG JAWAB	JADWAL KEGIATAN										
		I	I	III	IV								TR 1			TR 2			TR 3			TR 4		
													1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Meningkatkan kualitas pelayanan Keluarga Berencana	Pelayanan KB di desa	400	400	400	400	1	PROGRAM Pembinaan KB KEGIATAN : Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kab./pates/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Keserlaan Ber-KB SUB KEGIATAN : Pengutan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Keserlaan Ber-KB	Menurunkan angka kematian Ibu dan bayi	1600 orang	Membantu menurunkan angka kematian ibu	73 000 000	Subkor Pembinaan Keserlaan Ber-KB											
		1150	1150	1150	1150	2	PROGRAM Pembinaan KB KEGIATAN : Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kab./pates/Kota SUB KEGIATAN : Peningkatan Keserlaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Meningkatkan jumlah akseptor keserlaan penggunaan KB MKJP	1 kegiatan	Meningkatnya keserlaan pelayanan Ber KB	2 337 263.000	Subkor Pembinaan Keserlaan Ber-KB											

Mengetahui
Kabid KB DP2KBP2PA Kab. Kendal

Veronica Asri Anggraini, SKM
NIP. 196504261988122001

Kendal, 30 Januari 2023
Sub Koordinator Pembinaan Keserlaan Ber-KB
Kabupaten Kendal

Peni Yuniawati, S.S.T Keb
NIP. 197404212006042006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini:

Nama	:	Dra ARTI SETYANINGSIH
Jabatan	:	Analis Kebijakan Ahli Muda Pengarusutamaan Gender dan Pemenuhan Hak Anak pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana , Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal.

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama	:	SYAIFUL HUDA. ST,MA
Jabatan	:	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana , Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kendal, 20 Januari 2023

PIHAK KEDUA,	PIHAK PERTAMA
SYAIFUL HUDA, ST,MA	Dra. ARTI SETYANINGSIH
NIP. 197412032006041006	NIP 19670225 199203 2 007

PERJANJIAN KINERJA

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	128 000.000	DAU
2.	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	74.000 000	DAU
3.	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	78.416 250	DAU
4	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	50.000 000	DAU
5.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	40 000 000	DAU

No	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	79 000 000	DAU
2	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	49 000 000	DAU
	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	74 000 000	
3	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	78.416.250	DAU
4	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	25.000.00	DAU
5	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	25.000 000	DAU
6.	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	15.000.000	DAU
7	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan HakAnak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	25.000.000	DAU

Kendal, 30 Januari 2023

PIHAK KEDUA,

SYAIFUL HUDA, ST,MA
NIP. 197412032006041006

PIHAK PERTAMA,

Dra. ARTI SETYANINGSIH
NIP. 19670225 199203 2 007

RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2023

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK , KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KAB. KENDAL

Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Pengarusutamaan Gender dan Pemenuhan Hak Anak

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN				PROGRAM, KEGIATAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	RENCANA AKSI	ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB	JADWAL KEGIATAN											
		I	II	III	IV							TR 1			TR 2			TR 3			TR 4		
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12	13	14	15	15	17	18	19	20	21	22	23	24
Meningkatnya partisipasi PUG dan PUHA	IPG				93.1	**PROGRAM: PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**																	
						Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup AnakKewenangan Kabupaten/Kota																	
						Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	SDM pada Perangkat Daerah mengikuti Pelatihan PPRG	Peserta mampu menganalisis anggaran dengan GAP dan OBS	Pelatihan PPRG Bagi SDM OPD di Kabupaten Kendal	49 000 000	Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Pengarusutamaan Gender dan Pemenuhan Hak Anak												
						Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah KewenanganKabupaten/Kota																	

	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA						
	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Korban kekerasan yang mendapatkan advokasi dan bantuan hukum	1 Dokumen	Meningkatkan Pelayanan kepada Korban kekerasan yang	±8.000.000	Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Perlindungan Perempuan dan	
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK						
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bag Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	11 Layanan	Meningkatkan kualitas Pelayanan terhadap penanganan kasus korban kekerasan perempuan dan anak	45.000.000	Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Perlindungan Perempuan dan Anak	

Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Terbentuknya komitmen dan terimplementasinya Desa yang Ramah Perempuan dan Peduli Anak	2 DRPPA	-Pembentukan Komitmen - Penyusunan data pilah gender dan anak - Mendorong Perdes Perlindungan Anak - Pelaksanaan Pelatihan - Monitoring - Sosialisasi kepada masyarakat terkait DRPPA (anggaran DPR 2 gerak)	70 000 000	Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Pengarusutamaan Gender dan Pemenuhan Hak Anak
PROGRAM. PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup AnakKewenangan Kabupaten/Kota					
Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Terbentuknya SRA	10 SRA baru	Rapat dinas terkait - Pembentukan Komitmen - Pelatihan - Monev	15.000.000	Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Pengarusutamaan Gender dan Pemenuhan Hak Anak
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup AnakKewenangan Kabupaten/Kota					
Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terbentuknya GSIB	60 orang	- Koordinasi dengan Narasumber Pelatihan	25 000 000	Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Pengarusutamaan Gender dan Pemenuhan Hak Anak

Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha KewenanganKabupaten/Kota						
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah NonPemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Terbentuknya APSAI, PISA PUSPA, FA	4 Lembaga	-Rakor dengan dinas terkait Pembentukan - Peningkatan kapasitas pengurus	25 000 000	Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Pengarusutamaan Gender dan Pemenuhan Hak Anak	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya kapasitas Pengurus Forum Anak	Terlatihnya 2P bagi FA	-Rakor tim pembina - Pelatihan 2P Kesehatan, Lingkungan, Kependudukan	25 000 000	Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Pengarusutamaan Gender dan Pemenuhan Hak Anak	
PROGRAM: PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA						
Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak TingkatDaerah Kabupaten/Kota						
Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi KeluargaKewenangan Kabupaten/Kota	- Pembentukan PUSPAGA - peningkatan kapasitas pengurus	-Puspaga -Pengurusnya	- Rapat dengan dinas terkait - Rapat Pembentukan - Pelaksanaan kegiatan PUSPAGA - Sosialisasi adanya PUSPAGA di Kab Kendal kepada masyarakat	74 000 000	Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Pengarusutamaan Gender dan Pemenuhan Hak Anak	

PROGRAM: PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK						
Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam KelembagaanData di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						
Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya data	3 dokumen	- Rapat dengan penyedia barang Pembentukan Tim teknis dan tim pendukung penyelesaian administrasi pengadaan	78.415.250	Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Pengarusutamaan Gender dan Pemenuhan Hak Anak	
			Total Anggaran	370.415.250		

Kendal, 30 [illegible] 2023

Mengetahui
Kabid PPPA DP2KUP2PA Kab. Kendal

SYAIFUL HUJA, S.T., M.A
NIP. 19741203200604100[illegible]

Sub Koordinator PUG & PHA

Dian Septaningsih
NIP. 19870225 [illegible]

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemenntahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini

Nama	:	BENEDICTA LARAS PARAMITA,SH
Jabatan	:	Analis Kebijakan Ahli Muda Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana , Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal.

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama		SYAIFUL HUDA, ST.MA
Jabatan	:	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana , Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kendal 2023

PIHAK KEDUA,	PIHAK PERTAMA,
SYAIFUL HUDA, ST.MA	BENEDICTA LARAS PARAMITA,SH
NIP 197412032006041006	NIP 198601292010012O

PERJANJIAN KINERJA

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	196.000.000	DAU
2	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	20.000 000	DAU
3.	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	48.000 000	DAU
4.	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	29 000.000	DAU
5.	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	90 000.000	DAU

No	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	196 000 000	DAU
2.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	20.000.000	DAU
3	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	48 000.000	DAU
4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten /Kota	29.000.000	DAU
5.	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	45 0000 000	DAU
6	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	45 000 000	DAU

Kendal, 2023

PIHAK KEDUA,

SYAIFUL HUDA, ST,MA
NIP 197412032006041006

PIHAK PERTAMA,

BENEDICTA LARAS PARAMITA,SH
NIP. 198601292010012O

RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2023

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK , KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KAB. KENDAL

ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA SUB KOORDINATOR PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN				PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	RENCANA AKSI	ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB	JADWAL KEGIATAN												KET
			I	II	III	IV							TRI I			TRI 2			TRI 3			TRI 4			
													1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11												12
	Meningkatnya Penanganan Kasus Kekerasan Perempuan dan anak Meningkatnya Penanganan Kasus		20	45	75	100	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**																		
							Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota																		
							Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil koordinasi dan singkronisasi pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap	10 Dokumen	- sosialisasi penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak - Perluasan pelanggaran dan	150.000.000	Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Perlindungan Perempuan dan Anak													
							Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota																		
							Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi singkronisasi bagi perempuan korban kekerasan	10 Layanan	Meningkatkan Pelayanan kepada perempuan Korban kekerasan	20.000.000	Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Perlindungan Perempuan dan Anak													

Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota						
Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik Hukum, Sosial dan Ekonomi	Partisipasi perempuan bidang politik hukum sosial dan ekonomi pada organisasi masyarakat	29 Organisasi perempuan se Kab Kendal	memberikan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum Sosial dan Ekonomi pada organisasi masyarakat	91 000 000	Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota						
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	1 Kelompok Industri Rumahan wil Kecamatan	Membentuk Kelompok di R Tk Kabupaten Kecamatan dan desa. Memberikan pembinaan dan pendampingan industri rumahan	100 000.000	Seksi Peningkatan kualitas hidup perempuan	
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	1 Lembaga GOW Kab Kendal	memberikan sosialisasi Informasi Kebijakan dan memberikan Pencampingan	86 565 000	Seksi Peningkatan kualitas hidup perempuan	
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewerangan Kabupaten/Kota	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan pada lembaga penyedia layanan pemberdayan perempuan	2 Lembaga (GOW dan GOW) Kab Kenda	Meningkatkan partisipasi peran perempuan serta dan kesetaraan Gender dalam pembangunan	239.500 000	Seksi Peningkatan Kualitas hidup perempuan	
PROGRAM- PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)						

Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup AnakKewenangan Kabupaten/Kota						
Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Terbentuknya SRA	10 SRA baru	- Rapat dinas terkait - Pembentukan Konselmen - Pelatihan Monev	15.000.000	Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Pengarusutamaan Gender dan Pemenuhan Hak Anak	
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup AnakKewenangan Kabupaten/Kota						
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi LembagaPenyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlatihnya GSIB	60 orang	- Koordinasi dengan Narasumber - Pelatihan	25.000.000	Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Pengarusutamaan Gender dan Pemenuhan Hak Anak	
Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha KewenanganKabupaten/Kota						
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, NonPemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Terbentuknya APSAI, PSA, PUSPA, FA	1 Lembaga	-Rakor dengan Dinas terkait Pembentukan - Peningkatan kapasitas pengurus	25.000.000	Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Pengarusutamaan Gender dan Pemenuhan Hak Anak	

			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kot	Jumlah layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	10 Layanan	Meningkatkan kualitas Pelayanan terhadap penanganan kasus korban kekerasan perempuan dan anak	45.000.000	Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Perlindungan Perempuan dan Anak
			Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota					
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah layanan Pencegahan kekerasan terhadap anak	7 Dokumen	sosialisasi pencegahan kekasan terhadap anak	29.000.000	
						Total Anggaran	383.000.000	

Kendal, 2023

Mengetahui
Kepala Bidang PPPA
DP2KBP2PA Kabupaten Kendal

SYAIFUL HUDA, ST, MA
NIP. 19741203200504100[illegible]

Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator
Perlindungan Perempuan dan Anak
DP2KBP2PA Kabupaten Kendal

BENEDICTA ARAS PARAMITA, SH
NIP. 19880129201001[illegible]

CASCADING DP2KBP2PA

N0	TUJUAN:
1	Meningkatnya Pembangunan Yang Berkeadilan dan Responsif Gender peningkatan perlindungan perempuan dari kasus kekerasan, dan perdagangan, peningkatan pemenuhan hak anak dalam konsep Kabupaten Layak Anak dan Perlindungan Anak Khusus
2	Peningkatan Kualitas Kesehatan Melalui Pengendalian Jumlah Penduduk, dan Peningkatan Peserta KB

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	92,95	93,05	93,01	93,02	93,03	93,04
2	TFR (Total Fertility Rate)	Indeks	2,3	2,3	2,3	2,2	2,2	2,2

CASCADING DP2KBP2PA

N0	SASARAN STRATEGIS:
1	Meningkatnya Partisipasi Kelembagaan PUG dan PUHA
2	Meningkatnya penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak
3	Meningkatnya penanganan kasus perdagangan orang dan peningkatan pemenuhan hak anak dalam konsep KLA dan perlindungan anak khusus
4	Peningkatan pemakaian alat kontrasepsi modern bagi Pasangan Usia Subur (PUS)
5	Peningkatan layanan kekerasan ber KB bagi Pasangan usia subur (PUS)

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Prosentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100	100	100	100	100
2	Prosentase OPD yang mengimplementasikan PUG	%	50	50	75	100	100	100
3	Prosentase kekerasan terhadap perempuan yang tertangani	%	100	100	100	100	100	100
4	Prosentase lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga yang dibina	%	100	100	100	100	100	100
5	Prosentase OPD yang memiliki data pilah gender	%	100	100	100	100	100	100
6	Prosentase kecamatan layak anak	%	45	60	65	70	100	100
7	Prosentase kekerasan pada anak yang tertangani	%	100	100	100	100	100	100
8	Prosentase penurunan usia pernikahan dini	%	20	20	20	20	20	20
9	Prosentase kebutuhan ber KB yang terpenuhi (unmeet need)	%	15	14	13	12	11	10
10	Prosentase kelompok masyarakat di bidang pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahterah yang dibina	%	60	60	65	70	75	80

CASCADING DP2KBP2PA

N0	PROGRAM:
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah / Kota
2	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemeberdayaan Perempuan
3	Program Perlindungan Perempuan
4	Program Peningkatan Kualitas Keluarga
5	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
6	Program Pemenuhan Hak Anak
7	Program Perlindungan Khusus Anak
8	Program Pengendalian Penduduk
9	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
10	Program Pemberdayaan & Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Outcom	Satuan	Target					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya & mengembangnya kemampuan Aparatur & memberikan pelayanan Prima	Presentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100	100	100	100	100
2	Meningkatnya prosentase OPD yang mengimplementasikan PUG	Jumlah OPD yang mengumpulkan PPRG	%	100	100	100	100	100	100
3	Meningkatnya prosentase layanan kekerasan terhadap perempuan yang di tangani	Jumlah korban kekerasan yang terlayani & tertantangi	%	100	100	100	100	100	100
4	Meningkatnya Lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga yang dibina	Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga yang dibina	%	100	100	100	100	100	100
5	Meningkatnya Jumlah OPD yang memiliki data pilah gender	Jumlah OPD yang mengumpulkan data pilah gender kuantitatif	%	100	100	100	100	100	100
6	Meningkatnya jumlah kecamatan layak anak	Jumlah yang lounching layak anak	%	45	60	65	70	100	100
7	Meningkatnya prosentaselayanan kekerasan terhadap anak	Jumlah Korban kekerasan pada anak yang terlayani	%	100	100	100	100	100	100
8	Menurunya Usia pernikahan dini	Jumlah penurunan usia pernikahan dini	%	20	20	20	20	20	20
9	Meningkatnya layanan bagi kebutuhan ber KB bagi Pasangan Usia Subur (PUS)	Jumlah prosentase kebutuhan ber Kb bagi Pasangan Usia Subur (PUS)	%	15	14	13	12	11	10
10	Meningkatnya prosentase kelompok masyarakat di bidang pemberdayaan & peningkatan keluarga sejahtera yang dibina	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan keluarga yang dibina	%	60	60	65	70	75	80

CASCADING DP2KBP2PA

N0	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN:
1	***Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangda***
2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangda
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan IKhtisar Realisasi Kinerja SKPD
4	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***
5	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
6	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
8	***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***
9	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
10	Monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai
11	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarakan tugas dan fungsi
12	Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
13	***Administrasi Umum Perangda***
14	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor
15	Penyediaan Peralatan runmah tangga
16	Penyediaan bahan Logistik Kantor
17	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
18	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
19	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
20	Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD
21	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***
22	Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
23	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan
24	Pengadaan Mebel
25	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
26	Pengadaan Gedung kantor atau bangunan lainnya
27	Pengadaan sarana dan prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya
28	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***
29	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
30	Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik
31	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
32	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
33	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***
34	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
35	Pemeliharaan Mebel
36	Pemeliharaan/ rahabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya
37	***Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/ Kota***
38	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG
39	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota
40	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG
41	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG
42	***Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan***
43	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
44	*Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi*
45	***Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota***
46	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
47	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
48	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
49	***Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***
50	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
51	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
52	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
53	***Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***
54	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota
55	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota

56	***Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota***
57	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
58	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
59	***Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan***
60	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
61	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
62	Pengembangan Komunikasi, Informasi dancEdukasi Pemenuhan Hak Anak bagi LembagacPenyedia Layanan Peningkatan Kualitas HidupcAnak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
63	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
64	***Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten / Kota***
65	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten / Kota
66	***Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kot***
67	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
68	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten / Kota
69	***Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota***
70	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kab/Kota
71	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota
72	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan
73	***Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota***
74	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan
75	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
76	***Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***
77	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
78	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota
79	***Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***
80	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
81	***Pemaduan dan sinkronisasi kebiajakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuwalitas Penduduk***
82	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Program KKBPK
83	Penyusunan dan pemanfaatan Grand design kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota
84	Dukungan Pelaksanaan survei /pendataan Indeks pembangunan berwawasan kependudukan
85	Penguatan kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan jalur Formal
86	Penyediaan dan pengembangan materi pendidikan kependudukan jalur pendidikan formal sesuai isu lokasi Kabupaten/Kota
87	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan non Formal
88	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur informal di Kelompok kegiatan Masyarakat Binaan
89	Sosialisasi tentang pemanfaatan kajian dampak Kependudukan beserta model solusi strategis sebagai peringatan dini dampak Kependudukan kepada pemangku keoentingan
90	***Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai kearifan budaya***
91	Advokasi Program KKBPK Kepada Stakeholder dan Mitra kerja
92	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)Program KKBPK sesuai kearifan budaya lokal
93	Penyediaan dan distribusi sarana KIE program KKBPK
94	Promosi dan KIE program KKBPK melalui media massa cetak dan elektronik serta media luar ruang
95	***Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)***
96	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB
97	Penguatan pelaksanaan penyuluhan, penggerakkan pelayanan dan pengembangan program KKBPK untuk petugas keluarga berencana/ penyuluh lapangan keluarga berencana(PKB/PLKB)
98	Penggerakkan kader institusi masyarakat pedesaan (IMP)
99	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB di daerah Kab/Kota
100	Pengendalian pendistribusian alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di daerah Kab/kota
101	Peningkatan kompetensi pengelola dan petugas logistik alat dan obat kontrasepsi serta sarana penunjang pelayanan KB

102	Peningkatan kesertaan penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
103	Penyediaan dukungan ayoman komplikasi berat dan kegagalan penggunaan MKJP
104	Penyediaan sarana penunjang pelayanan KB
105	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi peserta KB
106	Pembinaan pelayanan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya
107	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran
108	Peningkatan Kesertaan KB Pria
109	Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dan mitra kerja lainnya dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber KB
110	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber KB
111	Integrasi Pembangunan Lintas sektor di Kampung KB
112	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB
113	Pembinaan Terpadu Kampung KB
114	***Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga***
115	Pengadaan sarana kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK R dan pemberdayaan ekonomi keluarga / UPPKS)
116	Orientasi dan pelatihan teknis pengelola ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
117	Orientasi/pelatihan teknis pelaksana /kader ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga / UPPKS)
118	Penyediaan Biaya Operasional bagi pengelola dan pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga / UPPKS)
119	Promosi dan Sosialisasi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga / UPPKS)
120	***Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten / kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga***
121	Penguatan kebijakan daerah dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dan mitra kerja lainnya dalam pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK R dan pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPKS)

No	Sasaran sub Kegiatan	Indikator Kinerja Outcom	Satuan	Target					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangda	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangda	%	100%dokumen	100%dokumen	100%dokumen	100%dokumen	100%dokumen	100%dokumen
2	dokumen perencanaan perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangda	%	100%dokumen	100%dokumen	100%dokumen	100%dokumen	100%dokumen	100%dokumen
3	Laporan realisasi dan capaian kinerja	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi konerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ihtisar realisasi kinerja SKPD	%	100% laporan	100% laporan	100% laporan	100% laporan	100% laporan	100% laporan
4	Dokumen Adminstrasi Keuangan	Jumlah dokumen administrasi keuangan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	ASN yang menerima gaji	Jumlah orang yang menerima gaji	bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
6	dokumen administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	%	100% dokumen	100% dokumen	100% dokumen	100% dokumen	100% dokumen	100% dokumen
7	*laporan evaluasi kinerja perangda*	Jumlah laporan kinerja perangda	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8	dokumen administrasi kepegawaian	Jumlah administrasi kepegawaian perangda	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9	Paket Pakaian dinas dan atributnya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10	Dokumen monev penilaian kinerja pegawai	Jumlah dokumen minitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

11	ASN yang mengikuti diklat	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	orang	24 orang	24 orang	24 orang	24 orang	24 orang	24 orang
12	Orang yang mengikuti bimtek peraturan perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimtek implementasi peraturan perundang-unadangan	orang	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang
13	dokumen administrasi umum perangda	Jumlah dokumen administrasi umum perangda	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
14	Paket peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
15	paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
16	paket bahan logistik kantor yang disediakan	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
17	paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
18	dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
19	laporan penyelenggaraan rakor dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
20	Penatausahaan arsip dinamis pada skpd	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada skpd	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
21	paket pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemda	Jumlah pengadaan barang milik daerha penunjang urusan pemda	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
22	Unit Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
23	Unit kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
24	Paket mebel yang disediakan	Jumlah paket mebel yang disediakan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
25	Unit peralatan dan mesin lainnya yang desediakan	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
26	Unit gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnnya	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
27	Unit sarpras gedung kantor	Jumlah unit sarana dan prasaraana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
28	Laporan jasa penunjang urusan pemda	Jumlah Laporan jasa penunjang urusan pemda	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
29	Laporan penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan penyediaan jasa surat menyurat	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
30	laporan Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Jumlah laporan Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
31	laporan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah laporan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

32	laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
33	laporan Jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemda	Jumlah laporan Jasa pemeliharaan barang milik daerah	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
34	laporan kendaraan perorangan atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah laporan kendaraan perorangan atau kendaraan dinas jabatan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
35	laporan mebel yang dipelihara	Jumlah laporan mebel yang dipelihara	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
36	laporan sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara	Jumlah laporan sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
37	Dokumen pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah kewenangan Kab/Kota	Jumlah Dokumen pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah kewenangan Kab/Kota	dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
38	Dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan PUG	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi perumusan pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) kewenangan Kab/Kota	dokumen	0	0	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen
39	Dokumen koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan PUG kewenangan Kab/Kota	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan PUG kewenangan Kab/Kota	DRPPA	DRPPA	1 DRPPA	5 DRPPA	10 DRPPA	10 DRPPA	10 DRPPA
40	Perangda yang melakukan advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangda yang melakukan advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan PUG termasuk PPRG	opd	0	0	0	48 OPD	48 OPD	48 OPD
41	Perangda yang melakukan sosialisasi kebijakan pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangda yang melakukan sosialisasi kebijakan pelaksanaan PUG termasuk PPRG	opd	0	0	48 OPD	48 OPD	48 OPD	48 OPD
42	Dokumen pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan kab/kota	Jumlah dokumen pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan kab/kota	dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
43	Dokumen sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi	Jumlah dokumen sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi	dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
44	Organisasi yang melaksanakan advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dan politik hukum sosial	Jumlah Organisasi yang melaksanakan advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dan politik hukum sosial	1 organisasi GOW	1 organisasi GOW	1 organisasi GOW	1 organisasi GOW	1 organisasi GOW	1 organisasi GOW	1 organisasi GOW
45	Dokumen penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kab/Kota	Jumlah dokumen penguatan dan pengembangan llembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kab/Kota	dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
46	Lembaga advokasi kebijakan dan pendampingan kepada lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kab/Kota	Jumlah lembaga advokasi kebijakan dan pendampingan kepada lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kab/Kota	lembaga	0	0	1	1	1	1

47	Sumberdaya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan peningkatan kapasitas kewenangan Kab/Kota	Jumlah sumberdaya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kab/Kota yang mendapatkan peningkatan kapasitas	orang	70	130	200	200	200	200
48	Dokumen pengembangan komunikasi informasi dan edukasi (KIE) pemberdayaan perempuan kewenangan Kab/Kota	Jumlah dokumen pengembangan komunikasi informasi dan edukasi (KIE) pemberdayaan perempuan kewenangan Kab/Kota	dokumen	1	1	1	1	1	1
49	Dokumen peningkatan kualitas keluarga dalam meweujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat daerah Kab/Kota	Jumlah dokumen peningkatan kualitas keluarga dalam meweujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat daerah Kab/Kota	Doc	1	1	1	1	1	1
50	Perangda yang mengadvokasi kebijakan dan pendampingan untuk mewujudkan KG dan perlindungan anak kewenagan kab/kota	Perangda yang mengadvokasi kebijakan dan pendampingan untuk mewujudkan KG dan perlindungan anak kewenagan kab/kota	perangda	1	1	1	1	2	2
51	Dokumen pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi KG dan perlindungan anak bagi keluarga kewenangan Kab/Kota	Jumlah dokumen pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi KG dan perlindungan anak bagi keluarga kewenangan Kab/Kota	%	0	0	0	100%	100%	100%
52	Layanan komperehensif bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan perlidungan anak yang wilayah kerjanya lingkup daerah Kabupaten / Kota yang tersedian	Jumlah layanan komperehensif bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan perlidungan anak yang wilayah kerjanya lingkup daerah Kabupaten / Kota yang tersedian	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
53	Dokumen pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah Kab/Kota	jumlah dokumen pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah Kab/Kota	dokumen	0	1 dokumen	3 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen
54	Dokumen penyediaan data gender dan anak di kewenangan Kab/Kota	Jumlah dokumen penyediaan data gender dan anak di kewenangan Kab/Kota	dokumen	0	0	2 dokumen	3 dokiumen	3 dokiumen	3 dokiumen
55	Dokumen penyajian dan pemanfaatan data gender dan anak dalam kelembagaan data di kewenangan Kab/Kota	Jumlah dokumen penyajian dan pemanfaatan data gender dan anak dalam kelembagaan data di kewenangan Kab/Kota	dokumen	0	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
56	Dokumen pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha kewenangan Kab/Kota	Jumlah dokumen pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha kewenangan Kab/Kota	dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
57	Organisasi yang mengadvokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha kewenangan Kab/Kota	Jumlah organisasi pemerintah, non pmerintah, media dan dunia usaha yang mendapat advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada organisasi pemerintah, non pemerintyah, media dan dunia usaha	lembaga	0	0	4 lembaga	4 lembaga	4 lembaga	5 lembaga

58	Dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelembagaan pemenuhan hak anak kewenangan Kab/Kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelembagaan pemenuhan hak anak kewenangan kab.kota	dokumen	1 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen
59	Dokumen penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan Kab/Kota	Jumlah dokumen penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan Kab/Kota	dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
60	Peserta yang mengikuti kegiatan penyediaan layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan Kab/Kota	Jumlah anak yang mendapatkan layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan Kab/Kota	orang	40	80	170	170	170	170
61	Dokumen koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah Kab/Kota	Jumlahn dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah Kab/Kota	dokumen	0	0	0	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
62	Dokumen pengembangan komunikasi informasi dan edukasi pemenuhan hak anak bagi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah Kab/Kota	Jumlah dokumen komunikasi informasi dan edukasi (KIE) pemenuhan hak anak bagi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah Kab/Kota	dokumen	100	150	120	120	120	120
63	Dokumen penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah kab/kota	Jumlah dokumen hasil penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kab/kota	dokumen	0	0	0	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
64	Layanan untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah Kab/Kota	Jumlah layanan untuk mencegah kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah Kab/Kota	layanan	20 Layanan	25 Layanan	25 Layanan	30 Layanan	30 Layanan	35 Layanan
65	Dokumen Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah Kab/Kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan kewenangan Kab/Kota	orang	20	25	30	30	35	35
66	Layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan Kab/Kota	Jumlah tersedianya Layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan Kab/Kota	layanan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
67	Perempuan korban kekerasan tingkat Kab/Kota yang mendapatkan layanan pengaduan	Jumlah perempuan korban kekerasan tingkat Kab/Kota yang mendapatkan layanan pengaduan	layanan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
68	Layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi perempuan korban kekerasan kewenangan Kab/Kota	Jumlah layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasiu bagi perempuan korban kekerasan kewenangan Kab/Kota	layanan	100%	100%	100%	100%	100%	100%

69	Laporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah Kab/Kota	Jumlah laporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah Kab/Kota	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
70	Laporan advokasi kebijakan dan pendampingan penyediaan sarana prasarana layanan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan Kab/Kota	Jumlah laporan advokasi kebijakan dan pendampingan penyediaan sarana prasarana layanan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan Kab/Kota	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
71	Layanan untuk mencegah kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah Kab/Kota	Jumlah layanan untuk mencegah kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah Kab/Kota	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
72	Dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan Kab/Kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan Kab/Kota	dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
73	Tersedianya layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah Kab/Kota	Jumlah layanan bagi anak yang memerlukan perlidungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah Kab/Kota	layanan	30 layanan	40 layanan	55 layanan	60 layanan	65 layanan	70 layanan
74	Anak yang memerlukan penyediaan layanan pengaduan masyarakat yang memerluka perlindungan khusus tingkat daerah Kab/Kota	Jumlah anak yang memerlukan perlindungan khusus mendapatkan layanan pengaduan kewenangan Kab/Kota	layanan	15 Layanan	20 Layanan	20 Layanan	25 Layanan	30 Layanan	35 Layanan
75	Layanan untuk melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan Kab/Kota	Jumlah layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan Kab/Kota	layanan	15 Layanan	20 Layanan	35 Layanan	35 Layanan	35 Layanan	35 Layanan
76	Laporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah Kab/Kota	Jumlah laporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah Kab/Kota	laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan
77	Laporan koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarana prasarana layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah Kab/Kota	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarana prasarana layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan Kab/Kota	orang	50 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	150 Orang	150 Orang

78	Dokumen pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemda provinsi dengan pemerintah daerah Kab/Kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk	Jumlah Dokumen pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemda provinsi dengan pemerintah daerah Kab/Kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk	dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
79	Dokumen penyusunan dan pemanfaatan grand design pembangunan kependudukan (GDPK) tingkat Kab/Kota	Jumlah Dokumen penyusunan dan pemanfaatan grand design pembangunan kependudukan (GDPK) tingkat Kab/Kota	dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
80	Dokumen dukungan pelaksanaan survei / pendataan indeks pembangunan berwawasan kependudukan	Jumlah Dokumen dukungan pelaksanaan survei / pendataan indeks pembangunan berwawasan kependudukan	dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
81	Dokumen penguatan kerjasama pelaksanaan pendidiakn kependudukan jalur pendidian non formal	Jumlah Dokumen penguatan kerjasama pelaksanaan pendidiakn kependudukan jalur pendidian non formal	dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
82	Dokumen penyediaan dan pengembangan materi pendidiakn kependudukan jalur penendidikan formal sesuai isu lokal Kab/Kota	Jumlah Dokumen penyediaan dan pengembangan materi pendidiakn kependudukan jalur penendidikan formal sesuai isu lokal Kab/Kota	dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
83	Laporan implementasi pendidikan kependudukan jalur pendidikan formal dan non formal	Jumlah Laporan implementasi pendidikan kependudukan jalur pendidikan formal dan non formal	%	10 %	15 %	20 %	25 %	30	40 %
84	Dokumen implementasi pendidikan kependudukan jalur informal di kelompok kegiatan masyarakat binaan	Jumlah Dokumen implementasi pendidikan kependudukan jalur informal di kelompok kegiatan masyarakat binaan	dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
85	Organisasi yang mengikuti advokasi tentang pemanfaatan kajian dampak kependudukan beserta model solusi strategis sebagai peringatan dini dampak kependudukan kepada pemangku kepentingan	Jumlah Organisasi yang mengikuti advokasi tentang pemanfaatan kajian dampak kependudukan beserta model solusi strategis sebagai peringatan dini dampak kependudukan kepada pemangku kepentingan	%	0 %	5 %	10 %	15 %	20 %	25 %
86	Dokumen pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal	Jumlah dokumen pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal	dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
87	Organisasi advokasi program KKBPK kepada stakeholder dan mitra kerja	Jumlah organisasi yang mendapatkan advokasi program bangga kencana (pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana) kepada stakeholder dan mitra kerja	%	2 %	5%	10 %	15 %	20 %	25 %
88	Dokumen komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) program KKBPK sesuai kearifan budaya lokal	Jumlah dokumen komunikasi informasi dan edukasi (KIE) program bangga kencana (pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana)	%	2 %	5 %	10 %%	15 %	20 %	25 %

89	Unit penyediaan dan distribusi sarana KIE program KKBPK	Jumlah unit sarana penyediaan dan pendistribusian KIE program bangga kencana (pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana)	%	2 %	5 %	10 %	15 %	20 %	25 %
90	Dokumen promosi dan KIE program KKBPK melalui media massa cetak dan elektronik serta media luar ruang	Jumlah dokumen promosi dan KIE program bangga kencana (pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana) melalui media massa cetak dan elektronik serta media luar ruang	%	20 %	25 %	30 %	35 %	40 %	50 %
91	Pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PKB)	orang	1927	1927	1927	1927	1927	1927
92	Organisasi yang mengikuti pembinaan IMP dan program KKBPK di lini lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah organisasi yang mengikuti pembinaan IMP danprogram bangga kencana (pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana) di lini lapangan oleh PKB/PLKB	organisasi	1	1	1	1	1	1
93	Sarana pendukung operasional PKB/PLKB yang tersedia	Jumlah sarana pendukung operasional PKB/PLKB yang tersedia	Unit	38 Unit	38 Unit	39 Unit	40 Unit	41 Unit	42 Unit
94	Laporan penguatan pelaksanaan penyuluhan, penggerakkan, pelayanan dan pengembangan program KKBPK untuk petugas keluarga berencana/penyuluh lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah laporan penguatan pelaksanaan penyuluhan, penggerakkan, pelayanan dan pengembangan program KKBPK untuk petugas keluarga berencana/penyuluh lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan
95	Kader institusi masyarakat pedesaan (IMP)	Jumlah kader yang mengikuti penggerakkan kader institusi masayarakat pedesaan (IMP)	orang	1927	1927	1927	1927	1927	1927
96	Laporan pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB didaerah Kab/Kota	Jumlah laporan pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di daerah Kab/Kota	laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan
97	Laporan pengendalian pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB ke fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	Jumlah laporan pengendalian pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB ke fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan

98	Orang yang berkompeten mengelola dan petugas logistik alat dan obat kontrasepsi serta sarana penunjang pelayanan KB	Jumlah akseptor yang mengikuti peningkatan kompetensi pengelola dan petugas logistik alat dan obat kontrasepsi serta sarana penunjang pelayanan KB	orang	55	68	69	70	70	70
99	Orang yang mengikuti penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah orang yang mengikuti kesertaan penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	orang	3000 orang	3500 orang	4000 orang	4500 orang	4500 orang	4500 orang
100	Laporan tersedianya dukungan ayoman komplikasi berat dan kegagalan penggunaan MKJP	Jumlah laporan dukungan ayomkomplikasi berat dan kegagalan penggunaan MKJP	laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan
101	Tersedianya unit sarana penunjang pelayanan KB	Jumlah unit sarana penunjang pelayanan KB	unit	1	1	1	1	1	1
102	Peserta KB yang terbina pasca pelayanan	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan pasca pelayanan bagi peserta KB	orang	400	410	420	430	440	450
103	Laporan pembinaan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	Jumlah laporan hasil pembinaan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan
104	Meningkatnya kompetensi tenaga pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi	Jumlah tenaga pelayanan yang mengikuti peningkatan kompetensi tenaga pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi	orang	5	5	5	5	5	5
105	mempromosikan dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	Jumlah orang yang mengikuti promosi dan konseling KB pasca persalinan dan pasca keguguran	orang	400	410	420	430	440	450
106	Meningkatnya kesertaan KB pria	Jumlah akseptor yang mendapat peningkatan kesetaraan kb pria	orang	11	11	11	11	11	11
107	Pemberdayaan dan peningkatan peranserta organisasi kemasyarakatan tingkat daeerah Kab/Kota dalam pelaksanaan pelayanan kesertaan ber KB	Jumlah pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah Kab/Kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber KB	organisasi	68	68	68	68	68	68
108	Penguatan peran serta organisasi kemasyarakatan dan mitra kerja lainnya dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber KB	Jumlah organisasi yang mendapatkan penguatan peran serta organisasi kemasyarakatan dan mitra kerja lainnya dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber KB	organisasi	68	68	68	68	68	68
109	Terintegrasinya pembangunan lintas sektor di kampung KB	dokumen hasil integrasi pembangunan lintas sektor di kampung KB	dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen

110	terlaksananya dan terkelolanya program KKBPK di kampung KB	Jumlah kampung KB yang mengikuti pelaksanaan dan pengelolaan program bangga kencana (pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana) di kampung kb	kampung KB	42 kampung KB	42 kampung kb	43 kampung kb	45 kampung kb	46 kampung kb	47 kampung kb
111	Terbinanya kampung KB yang terpadu	Jumlah dokumen hasil integrasi pembangunan lintas sektor di kampung KB	dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
112	Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Jumlah pelaksanaan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	doc	1	1	1	1	1	1
113	Pengadaan sarana kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK R, dan pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPKS)	Jumlah unit sarana kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	unit	20 Unit	20 Unit	20 Unit	20 Unit	20 Unit	20 Unit
114	Orientasi dan pelatihan teknis pengelola ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK R dan pemberdayaan ekonomi keluarga / UPPKS)	Jumlah laporan hasil orientasi dan pelatihan teknis pengelola ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB,BKR, BKL, PPPKS, PIK R, dan pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPKS)	laporan	5 orang	20 orang	20 orang	25 orang	25 orang	25 orang
115	Orientasi / pelatihan teknis pelaksana/kader ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK Rdan pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPKS)	Jumlah kader yang mengikuti orientasi/pelatihan teknis pelaksana/kader ketahanan dan kesejahteraan keluarga(BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK R dan pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPKS)	orang	8 keg	8 keg	10 keg	12 keg	15 keg	18 keg
116	Penyediaan biaya operasional bagi pengelola dan pelaksana (kader) ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK -R dan pemberdayaan ekonomi keluarga /UPPKS)	Jumlah kader pengelola dan pelaksana (kader) ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPKS)	orang	0	3600 org/bln	4200 org/bln	4200 org/bln	4200 org/bln	4200 org/bln
117	Promosi dan Sosialisasi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK R dan pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPKS)	Jumlah laporan hasil promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK R dan pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPKS)	Laporan	10 keg	15 keg	15 keg	15 keg	15 keg	15 keg
118	Laporan promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (menjadi orang tua hebat, generasi berencana, kelanjutusiaan serta pengelolaan keuangan keluarga)	Jumlah laporan promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (menjadi orang tua hebat, generasi berencana, kelanjutusiaan serta pengelolaan keuangan keluarga)	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan

119	penumbuhan dan peningkatan kesadaran keluarga dalam keterlibatan perencanaan kehidupan menuju keluarga berkualitas	Jumlah keluarga yang mengikuti penumbuhan dan peningkatan kesadaran keluarga dalam keterlibatan perencanaan kehidupan menuju keluarga berkualitas	keluarga	0	0	0	10	10	10
120	**Pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kab/kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga**	**Jumlah pelaksanaan dan peningkatan peran sewrta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah Kab/Kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga**	organisasi	10 keg	15 keg	15 keg	15 keg	15 keg	15 keg
121	Penguatan kebijakan daerah dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dan mitra kerja lainnya dalam pembinaan Ketahanan dan kesejahteraan (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah organisasi yang mengikuti penguatan kebijakan daerah dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dan mitra kerja lainnya dalam pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK R dan pemberdayaan ekonomi keluarga / UPPKS)	organisasi	10 keg	15 keg	15 keg	15 keg	15 keg	15 keg

PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Jl. Soekarno Hatta Kendal Telp. (0294) : 381143 dan Fax (0294) 383984
Website : www.dp2kbp2pa.kendalkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KENDAL

NOMOR : 050/1961/XII/2021

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KENDAL

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KENDAL

Menimbang :

a. bahwa agar fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan pemberdayaan perempuan perlindungan anak dapat berjalan dengan baik dan berhasil, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 maka perlu dibuat Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950

tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang_Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-

daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 2 Seri E No.1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 30);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kendal Tahun 2021–2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal sebagaimana

dimaksud diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal untuk:

a. menetapkan rencana kinerja tahunan;
b. menyampaikan rencana kerja dan anggaran;
c. menyusun dokumen penetapan kinerja;
d. menyusun laporan akuntabilitas kinerja; dan
e. melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026.

KETIGA : Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal dan disampaikan kepada Bupati Kendal sesuai peraturan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kendal
pada tanggal : 31 Desember 2021

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,
KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN KENDAL

PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL DP2KBP2PA

ASRIFAH, S.Kep

Tembusan :

1. Bupati Kendal;
2. Inspektur Kabupaten Kendal;
3. Kepala Baperlitbang Kabupaten Kendal;
4. Arsip.

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya pembangunan yang berkeadilan dan responsif gender peningkatan perlindungan perempuan dari kasus kekerasan dan perdagangan peningkatan pemenuhan hak anak dalam konsep Kabupaten Layak Anak dan Perlindungan Anak Khusus	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	IPG = IPM perempuan / IPM laki laki	Badan Pusat Statistik	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	Meningkatnya kualitas kesehatan melalui pengendalian jumlah penduduk dan peningkatan peserta KB	Prosentase Anak Korban Kekerasan yang ditangani instansi terkait	Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat Kabupaten / Kota yang didampingi .....x 100% Jumlah Anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun)	Badan Pusat Statistik	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Jumlah perempuan yang mengalami kekerasanx 100.000 jumlah penduduk perempuan	Badan Pusat Statistik	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		TFR (Total Fertility Rate)	Jumlah angka kelahiran (ASFR) dikalikan dengan interval kelompok umur	BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional)	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Presentase pemakaian kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate / mCPR)	Jumlah peserta KB aktif modern/ x 100% Jumlah Pasangan Usia Subur	BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional)	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Presentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (unmetned)	Jumlah Pasangan Usia Subur yang ingin ber KB tetatpi tidak terlayani /X 100% Jumlah Pasangan Usia Subur	BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional)	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kepala DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PENDUDUK DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KENDAL

ASRIFAN, S.Kep